

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang melakukan pembangunan untuk dapat terus maju dan menghindari ketertinggalan dengan negara lain. Pembangunan dianggap sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Proses dalam pembangunan sendiri mencakup adanya pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, bertanggungjawab dengan menyesuaikan kapasitas iklim, adanya upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup, adanya regulasi yang bersifat global, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memiliki lingkungan yang seimbang, dan adanya sikap responsif terhadap antar generasi¹.

Satu tahun terakhir salah satu pembangunan yang menarik perhatian bagi Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan *output* perkapita yang berlangsung terus menerus dalam jangka panjang². Perekonomian di Indonesia merupakan salah satu sektor vital yang harus terus didorong guna mencapai target pertumbuhan maupun pemerataan. Hal ini menjadikan perekonomian termasuk dalam bagian perencanaan pembangunan nasional di Indonesia yaitu RPJMN IV tahun 2020-2024 yang memiliki 7 agenda pembangunan salah satunya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Dengan adanya rencana strategis yang telah disusun oleh pemerintah yang memiliki peran besar terhadap pembangunan berkelanjutan, melalui pembangunan ekonomi diharapkan agar seluruh kelompok masyarakat

¹ Kementerian PPN. (2020). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Kementerian PPN. Hal. 1. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2021. <https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf>.

² Purba, Bonaraja, dkk. (2021). Ekonomi Pembangunan. Yayasan Kita Menulis. Hal 1. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2021. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LbAfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pembangunan+ekonomi+indonesia&ots=GZIDZfkVZ1&sig=FLsnaun2ETGuvQmreRuHWAaWP0o&redir_esc=y#v=onepage&q=pembangunan%20ekonomi%20indonesia&f=false

dapat diberikan peluang untuk memperoleh akses ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan rakyat³.

Pada tahun 2020 dunia dikejutkan dengan adanya penyebaran virus *Corona Virus Diseases 2019* atau yang sering disebut dengan Covid-19. Kemunculan COVID-19 bermula di Wuhan, Provinsi Hubei China pada 8 Desember 2019. Penyebaran virus yang sangat cepat menyebabkan angka kematian yang tinggi mencapai 4.797.368 jiwa, dan jumlah kasus kumulatif yang masih mencapai 234.609.003 jiwa di seluruh dunia⁴. Adanya Covid-19 menyebabkan dampak yang sangat besar bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Sehingga pada tanggal 12 April 2020 Presiden Indonesia Joko Widodo secara resmi mengumumkan bahwa virus Covid-19 menjadi bencana nasional. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, jumlah kumulatif masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 adalah 4.220.206 jiwa, diikuti dengan jumlah pasien yang sembuh sebanyak 4.046.891 jiwa dan yang meninggal sebanyak 142.261 jiwa. Jumlah ini tersebar di 34 provinsi dan 376 kabupaten/kota⁵.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam merespon bencana kesehatan guna memutus rantai penyebaran Covid-19, dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Pada tahun 2020 Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan produk hukum akan penanganan Covid-19. Kebijakan tersebut merupakan respons atas eskalasi masalah, baik dari segi kesehatan masyarakat, sosial, keuangan, konsekuensi administrasi, kewenangan dan politik dalam birokrasi pemerintahan, berdasarkan kronologi krisis dan responnya. Pada tahun 2021 Indonesia masih belum menunjukkan penurunan pada angka kasus Covid-19. Tercatat pada tanggal 31 Desember 2020 angka kasus Covid-19 mengalami kenaikan sebanyak 3.927, sehingga pada tanggal 31 Januari

³ Bappenas. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Bappenas.go.id. [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/Narasi Rancangan RPJMN 2020-2024.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/Narasi%20Rancangan%20RPJMN%2020-2024.pdf). Hal 2.

⁴ Who.int. (2021). *Coronavirus Disease (COVID-19) – World Health Organization*. Diakses pada 4 Oktober 2021. <https://covid19.who.int/table>

⁵ Satgas.COVID-19. Peta Sebaran. Diakses pada 4 Oktober 2021. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

2021 jumlah pasien yang telah terinfeksi mencapai 12.001 jiwa. Melihat situasi ini Pemerintah RI mengambil tindakan dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dengan pertimbangan melanjutkan kebijakan PPKM wilayah Pulau Jawa dan Bali, pemerintah perlu melaksanakan secara teliti pada tingkat masyarakat yang paling kecil. Sehingga pada tanggal 5 Februari 2021 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Inmendagri Nomor 03 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan dengan target penurunan kasus pada wilayah tertentu dengan parameter zona hijau, kuning, merah, dan hitam sebagai tolak ukurnya. Sejak bulan Juni jumlah kasus Covid-19 meningkat drastis setiap harinya, hingga pada 15 Juli 2021 jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 56.757 jiwa. Kenaikan angka kasus membuat pemerintah bergerak cepat dengan melakukan PPKM Darurat melalui kebijakan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 dan Imendagri Nomor 16 Tahun 2021 dengan menerapkan tolak ukur yang terdiri dari lima level mulai dari 0 (terbaik) hingga level 4 (terburuk) sesuai dengan situasi epidemiologi wilayah setempat ⁶.

Dampak dari adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi beberapa sektor kehidupan yang meliputi sektor kesehatan, pariwisata, kesejahteraan, pelayanan publik, dan juga sektor ekonomi nasional. Selain mengancam kesehatan manusia, pandemi juga mengancam kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia⁷. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tahun 2020 Indonesia mengalami kontraksi dua kuartal berturut-turut. Berdasarkan perhitungan *Year on year (yoy)* pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 Triwulan I dan Triwulan II mengalami

⁶ Gitiyarko, V., (2021). PSBB Hingga PPKM , Kebijakan Pemerintah Menekan Laju Penularan Covid-19. *Kompaspedia.kompas.Id*. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2021. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/psbb-hingga-ppkm-kebijakan-pemerintah-menekan-laju-penularan-covid-19>.

⁷ Shangguan, Z., Wang, M. Y., (2020). *What Caused the Outbreak of COVID-19 in China : From the Perspective of Crisis Management*. International Journal of Environmental Research and Public Health. Hal. 2. <https://doi.org/10.3390/ijerph17093279>.

penurunan mencapai -5,32 persen, pada Triwulan III dan Triwulan IV mengalami kenaikan hingga -2,19 persen⁸. Selain berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sejak awal tahun 2020 angka kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan terus menerus, dan pada bulan September jumlah kemiskinan meningkat secara cepat hingga 10,19% atau mencapai 27,55 juta jiwa⁹. Dengan adanya kenaikan angka kemiskinan dan juga adanya ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran bahwa kondisi ini tidak menjamin perekonomian Indonesia dapat kembali seperti semula, karena kondisi yang tidak pasti akibat pandemi Covid-19 membuat pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan yang disusun dengan kemungkinan yang ada guna mencapai target pemulihan ekonomi di tahun 2021. Hal lainnya terkait isu kemiskinan menjadi perhatian bagi pemerintah, karena menjadi salah satu penghambat dalam pembangunan di Indonesia. Dalam mewujudkan kondisi yang stabil diperlukan peranan multi pihak seperti pemerintah, swasta (dunia usaha), serta masyarakat untuk mendorong pembangunan¹⁰.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami dampak Covid-19 sejak bulan April 2020. UMKM memiliki peran yang strategis bagi perekonomian Indonesia, tetapi UMKM juga masih memiliki permasalahan kronis yang sering dihadapi dalam kondisi normal seperti akses keuangan dan pembiayaan, akses terhadap bahan baku, akses tenaga kerja dan sumber daya manusia (SDM), dan akses terhadap pasar dan permintaan¹¹. Dengan adanya kebijakan terkait pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19, sektor ini rentan menghadapi guncangan ekonomi hingga UMKM sulit untuk mempertahankan

⁸Bappenas. (2021). Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia Dan Dunia Triwulan IV 2020. [Bappenas.go.id](https://www.bappenas.go.id). Diakses pada tanggal 6 Oktober 2021. [https://www.bappenas.go.id/updateekonomiindonesiaduniashow?q=Perkembangan Ekonomi&subtop=Perkembangan Ekonomi Indonesia Dan Dunia](https://www.bappenas.go.id/updateekonomiindonesiaduniashow?q=Perkembangan%20Ekonomi&subtop=Perkembangan%20Ekonomi%20Indonesia%20Dan%20Dunia). Hal 17

⁹BPS. (2021). Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2021. [bps.go.id](https://www.bps.go.id). Diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

¹⁰Zumrotun, Solichah. (2018). INFID Paparkan Tiga Tantangan Pelaksanaan SDGs di Indonesia. Jember. jatim.antaranews.com. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2021. <https://jatim.antaranews.com/berita/250524/infid-paparkan-tiga-tantangan-pelaksanaan-sdgs-di-indonesia>.

¹¹Damuri, Yose R., dkk. (2020). Langkah Pemberdayaan UMKM Dalam Menghadapi COVID-19. CSIS Policy Paper. Jakarta: CSIS Indonesia.

kelangsungan usahanya. Dampak yang dialami oleh UMKM saat ini meliputi penurunan permintaan, akses keuangan dan pembiayaan, rantai bahan pasok, dan juga penggunaan teknologi digital, tantangan ini juga sejalan dengan prediksi RPMN IV 2020-2024, dimana pemerintah memprediksi tantangan perekonomian 2020-2024 yang meliputi ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, defisit transaksi berjalan yang meningkat, dan revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital. Selain itu, menurut survei lembaga BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan banyak UMKM kesulitan untuk melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan, bahkan pelaku usaha harus melakukan PHK¹². Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia UMKM yang terdampak pandemi sebanyak 87,5%, dari jumlah ini sekitar 93,2% mengalami negatif pada sisi penjualan¹³, dan didukung dengan hasil survei *Asian Development Bank* (ABD) menyebutkan bahwa sekitar 50% UMKM di Indonesia gulung tikar, dan 88% UMKM tidak memiliki tabungan untuk mempertahankan usahanya. Hal ini terjadi karena minimnya pemasukan dari sisi penjualan, dan rata-rata omset turun dari 40% hingga 70%¹⁴.

UMKM menjadi salah satu sektor bisnis dengan potensi yang besar terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi sehingga menjadikan UMKM sebagai bisnis yang digalakkan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07% atau mencapai Rp 8.573,89 triliun¹⁵, dan juga perkembangan jumlah UMKM di Indonesia dapat dilihat melalui Tabel I.1.

¹² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih Di Masa Pandemi. Jakarta. *ekon.go.id*. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2021. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>.

¹³ Saputra, Dany. (2021). Survei BI : 87,5 Persen UMKM Indonesia Terdampak Pandemi Covid-19. Jakarta. *bisnis.com*. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210319/9/1370022/survei-bi-875-persen-umkm-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19>.

¹⁴ Putra, Dwi A. (2020). 50 Persen UMKM Gulung Tikar Akibat Pandemi Covid-19. Jakarta. *Merdeka.com*. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2021. <https://www.merdeka.com/uang/imbis-pandemi-50-persen-umkm-gulung-tikar-akibat-pandemi-covid-19.html?page=1>.

¹⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia. Jakarta. *ekon.go.id*. Diakses pada tanggal 8

Tabel I.1 Usaha Kecil Mikro Menengah di Indonesia

No.	Keterangan	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah UMKM (Unit)	61.651.177	62.922.617	64.194.057	65.465.497
2.	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	112.828.610	116.431.224	116.978.631	119.562.834
3.	PDB Konstan Tahun (Miliar)	5.171.063,60	5.445.564,40	5.721.148,10	7.034.146,7

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM RI (2019), diolah penulis

Berdasarkan Tabel I.1 Perkembangan UMKM pada Periode 2016 hingga 2019 data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja mulai dari 112,3 juta orang hingga 119,5 juta orang yang artinya penyerapannya mencapai 97 %. Selain penyerapan tenaga kerja yang tinggi, UMKM juga mampu memberikan kontribusinya terhadap PDB hingga 7 miliar pada tahun 2019. Walaupun angka peningkatan UMKM tidak meningkat drastis, adanya konsistensi yang selalu meningkat setiap tahunnya menggambarkan bahwa UMKM mampu bersaing dan juga memulihkan perekonomian di Indonesia.

Pemerintah selaku mobilitator, memberikan dukungan dan juga perlindungan hukum untuk mendorong UMKM melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, seperti Pasal 13 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMKM) dan Koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya. Regulasi ini telah memberikan perhatian terhadap bidang usaha informal yang dijalankan oleh Usaha Kecil dan Menengah. Pada tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi acuan untuk pemberdayaan dan juga pengembangan UMKM di Indonesia. Aturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, yang memiliki tujuan pada sektor usaha kecil menengah mendapat perhatian dengan meningkatkan akses pengembangan usaha ekonomi kerakyatan melalui pemberian bantuan permodalan usaha. Adanya kebijakan ini diharapkan mampu dalam membantu financial untuk masyarakat yang terlibat dalam pengembangan UMKM dan juga meningkatkan perekonomian nasional.

Selain memberikan perlindungan hukum, pemerintah juga berupaya untuk pemulihan ekonomi nasional yang terkena dampak pandemi Covid-19 dengan mendorong sektor UMKM melalui program prioritas dukungan. Dalam rangka melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk merespon konflik ini, salah satunya melalui anggaran untuk beberapa sektor yang meliputi anggaran kesehatan dan sosial ekonomi dari Covid-19 dengan besaran anggaran mencapai Rp 695,2 triliun, di mana Rp 403,75 triliun akan diperuntukkan sebagai stimulus ekonomi yang diberikan dalam bentuk berbagai program. Pemerintah telah mencadangkan dana sebesar Rp 123.46 triliun dalam rangka pemulihan UMKM terkena dampak Covid-19. Bantuan ini dibagi menjadi enam skema bantuan yaitu, kesehatan (Rp. 87,55 Triliun), perlindungan sosial (Rp. 203,90 Triliun), insentif usaha (Rp. 120,61 Triliun), UMKM (Rp. 123,46 Triliun), pembiayaan korporasi (Rp. 53,57 Triliun), dan sectoral K/L & Pemda (Rp. 106,11 Triliun). Bantuan dalam bentuk penganggaran, dianggap masih kurang efektif untuk menanggulangi permasalahan ini. Dibutuhkan kebijakan yang memadai untuk menjamin tata kelola pemerintah yang memenuhi hak atas penjaminan UMKM pada situasi krisis saat ini, salah satunya menerapkan berbagai kebijakan yang ditargetkan untuk memulihkan kondisi UMKM sebagai salah satu sektor yang paling terkena dampak pandemi.

1. Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terkena dampak *Corona Virus Disease* 2019. Nomor Kebijakan PMK No. 44/PMK.03/2020, tanggal 17 April 2020.
2. Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Nomor Kebijakan PP 23/2020, tanggal 11 Mei 2020

3. Tentang Penempatan Dana Pada Bank Peserta Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Nomor Kebijakan PMK-64/PMK.05/2020, tanggal 5 Juni 2020.
4. Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembayaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Nomor Kebijakan PMK-65/PMK.05/2020, tanggal 5 Juni 2020.
5. Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian. Nomor Kebijakan Keputusan Bersama Mendagri Nomor 119/2813/SJ dan Menkeu Nomor KMK 177/KMK.07/2020, tanggal 9 April 2020.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Nomor Kebijakan No.11/POJK.03/2020, ditetapkan tanggal 13 Maret 2020, berlaku 16 Maret 2020 - 31 Maret 2021.
7. Koordinasi Pelaksanaan Penempatan Dana dan Pemberian Subsidi Bunga dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Nomor Kebijakan 265/KMK.010/2020 dan SKB-1/D.01/2020, tanggal ditetapkan 28 Mei 2020, berlaku hingga 31 Desember 2021.
8. Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terkena Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Nomor Kebijakan Permenko Perekonomian 6/2020, tanggal ditetapkan 14 April 2020, berlaku sejak 1 April 2020.
9. Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terkena Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Nomor Kebijakan Permenko Perekonomian 8/2020, tanggal Peraturan 6/2020 berlaku sejak 1 April 2020 namun perubahan 8/2020 ditetapkan pada 6 Mei 2020.
10. Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggung jawaban Dana Kartu Prakerja. Nomor Kebijakan PMK-25/PMK.05/2020 dan SP- 26/KLI/2020 (Bukan Kebijakan Khusus UMKM, namun banyak Pelaku

UMKM Memenuhi Syarat Penerima Kartu Prakerja), tanggal PMK ditetapkan 24 Maret 2020, Berlaku mulai 26 Maret 2020.

Implementasi Program PEN telah berdampak positif pada roda perekonomian di Indonesia. BRI Micro dan SME Index (BMSI) mencatat adanya kenaikan signifikan terhadap Indeks Aktivitas Bisnis (IAB), Index Ekspektasi Aktivitas Bisnis (IEAB), dan Indeks Sentimen Bisnis (ISB) pada tahun 2021. Berdasarkan riset BMSI meningkat menjadi 93,0 dari Triwulan IV 2020 yang berada di angka 81,5. UMKM optimis terhadap mempertahankan bisnisnya di masa pandemi juga ditunjukkan melalui indeks ekspektasi BMSI yang meningkat secara signifikan hingga 128,0 dari 105,4 pada Triwulan IV 2020. Selain itu, persepsi pelaku UMKM juga mengalami kenaikan terhadap perekonomian hal ini ditunjukkan melalui ISB pelaku UMKM meningkat secara signifikan hingga 115,5 dari 90,2 pada Triwulan IV 2020¹⁶. -Keberhasilan Pemerintah dalam menjalankan program PEN tidak hanya didukung melalui penelitian tetapi dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kenaikan PDB tahun 2021 Triwulan I mengalami peningkatan hingga -0,74 persen, dan kenaikan PDB tahun 2021 Triwulan II yang mengalami peningkatan hingga 7,07 persen atau setara dengan Rp 4.175,8 triliun¹⁷. Kontribusi tertinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa sebesar 57,92 persen. Salah satu Provinsi yang membantu pertumbuhan ekonomi, salah satunya yaitu Jawa Timur. Pada tahun 2021 Jawa Timur memberikan kontribusi 24,93 persen setelah DKI Jakarta kepada Pulau Jawa¹⁸. Sedangkan kontribusinya terhadap perekonomian secara nasional, Jawa Timur menyumbang sebanyak 14,44 persen.

Kontribusi Jawa Timur yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga didukung dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tahun 2020 Triwulan IV pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih

¹⁶BRI. (2021). Pelaku UMKM Semakin Optimis Kondisi Akan Lebih Baik. Jakarta. *bri.co.id*. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021. <https://bri.co.id/en/detail-news?urlTitle=pelaku-umkm-semakin-optimis-kondisi-akan-lebih-baik>.

¹⁷ BPS. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2021. *bps.go.id*.

¹⁸ Kominfo. (2021). BPS: Jatim Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Terbesar Kedua Di Pulau Jawa. Jawa Timur. *kominfo.jatimprov.go.id*. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021. <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/bps-jatim-sumbang-pertumbuhan-ekonomi-terbesar-kedua-di-pulau-jawa>.

berada di angka -2,64 persen, tetapi dengan adanya kelonggaran kebijakan yang diberikan oleh pemerintah memberikan pertumbuhan positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 Triwulan I angka pergerakan pertumbuhan ekonomi mencapai -0,44 persen, dan pada saat Triwulan II pertumbuhan ekonomi Jawa Timur meningkat drastis hingga mencapai 7,05 persen atau mencapai Rp 604,84 triliun¹⁹. Pertumbuhan yang dinilai cukup signifikan ini karena adanya keterlibatan UMKM, di mana 59,78 persen merupakan pengeluaran konsumen Rumah Tangga. Sedangkan pada Kabupaten Sidoarjo mengalami Inflasi pada bulan Maret 2021 tercatat 0.08 persen. Sedangkan tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2020 sebesar 0.04 persen dan pada tahun 2019 dengan inflasi 0.17 persen. Laju inflasi tahun kalender Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 sebesar 0.74 persen. Tingkat inflasi kumulatif pada periode yang sama tahun 2020 dan 2019 adalah 0.85 persen dan 0.35 persen. Sehingga besarnya laju inflasi *year on year* untuk Maret 2021 terhadap Maret 2020 sebesar 1.20 persen. Tingkat inflasi tahun ke tahun untuk Maret 2020 terhadap Maret 2019 dan Maret 2019 terhadap Maret 2018 masing-masing 2.62 persen dan 2.24 persen.

Sejak tahun 2020 UMKM telah menjadi backbone perekonomian nasional maupun perekonomian daerah, karena UMKM didirikan melalui modal individu dan juga tidak tergantung dengan pinjaman maupun mata uang asing menjadikan. Terlebih sektor koperasi dan UMKM di Jawa Timur menjadi salah satu sektor yang memiliki peran dalam memajukan perekonomian daerah. Untuk dapat terus membangun dan mempertahankan konsistensi UMKM, dibutuhkan adanya peranan pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan memberikan perlindungan terhadap sektor UMKM. Untuk merespon situasi ini, Pemerintah daerah Jawa Timur membuat suatu regulasi yang lebih terfokus dan juga dapat memenuhi kebutuhan pelaku UMKM. Regulasi ini tercantum pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha,

¹⁹ BPS. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Triwulan II-2021. Jawa Timur. bps.go.id.

dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya. Sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam memajukan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Dengan adanya dukungan pemerintah daerah melalui regulasi, hal ini juga berdampak pada pertumbuhan jumlah UMKM yang ada pada Provinsi Jawa Timur. Rata-rata jumlah UMKM di setiap kota maupun diatas 100.000 UMKM, dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik UMKM di Jawa Timur hingga saat ini mencapai 18.208.066 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 13.663.614. Jawa Timur memiliki lima wilayah unggulan yang menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel I.2 Lima Kabupaten/Kota Unggulan Dalam Perekonomian Di Jawa Timur

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM	Tenaga Kerja	PDRB (Triliun)	Nilai Produksi (Miliar)
1.	Kota Surabaya	1.716.440	1.705.919	304,502	2.928.797.230
2.	Sidoarjo	801.740	757.739	115,47	6.163.958.314
3.	Pasuruan	719.241	536.644	92,64	3.452.936.820
4.	Gresik	611.109	516.229	79,20	1.596.046.841
5.	Malang	987.843	646.448	74,31	1.621.075.898
Jumlah		4.836.373	4.162.564	666,122	15.762.810.103

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur 2021, diolah peneliti.

Pada tabel I.2 merupakan lima Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian. Hal ini dapat dilihat melalui angka PDRB yang diduduki oleh Kota Surabaya sebanyak 304,502 triliun, dan PDRB terendah diduduki oleh Kabupaten Malang sebanyak 74,31 triliun. Selain adanya pertumbuhan ekonomi, penelitian ini juga berfokus pada UMKM yang dimana jumlah UMKM tertinggi ada pada Kota Surabaya sebanyak 1.716.440 unit, Kabupaten Malang sebanyak 987.843 unit, dan Kabupaten Sidoarjo sebanyak 801.740 unit. Pada nilai produksi di bidang UMKM Kabupaten Sidoarjo meraih angka tertinggi mencapai 6,163,958,314 miliar, sedangkan

Kabupaten Gresik menjadi Kabupaten yang meraih angka terendah mencapai 1,596,043,841 miliar. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki angka persentase pekerja yang bekerja di bidang UMKM Sidoarjo hanya sebesar 5,79%, tetapi Kabupaten Sidoarjo mampu menghasilkan nilai produksi yang sangat tinggi dan menempati peringkat pertama dibandingkan Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Gresik, maupun Malang.

Salah satu kabupaten yang menjadi penopang dalam perekonomian Jawa Timur, yaitu kabupaten Sidoarjo. Selain memiliki serapan tenaga kerja yang tinggi, kabupaten Sidoarjo dinobatkan sebagai “Kota UKM Indonesia”. Penetapan Kabupaten Sidoarjo menjadi Kota UKM Indonesia karena, Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten pendukung bagi Jawa Timur karena perannya yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Sentral industri perusahaan nasional maupun internasional juga berdiri di Kabupaten Sidoarjo. Jumlah UMKM di Kabupaten Sidoarjo memang tidak sebanyak dengan kabupaten atau kota yang ada pada Provinsi Jawa Timur, tetapi Kabupaten Sidoarjo memiliki UMKM yang aktif. Pada tahun 2017 kabupaten Sidoarjo menjadi kabupaten yang memiliki daya serap tenaga kerja yang paling besar di Jawa Timur mencapai 94,07 persen dan juga menyumbang PDRB Perkapita Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 sampai dengan 2018 yang mengalami kenaikan hingga mencapai 7,36 persen²⁰. Kondisi UMKM Kabupaten Sidoarjo yang efektif, menjadi suatu potensi untuk dapat menanggulangi kemiskinan, membangun pertumbuhan ekonomi, dan juga mempercepat tercapainya kesejahteraan sosial.

Dalam tahun ketahun perkembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan yang cukup pesat. Pada tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo terdapat 171.264 usaha yang terbagi menjadi usaha besar 16.000 usaha, 154.891 usaha mikro dan usaha kecil menengah sebanyak 154, dan dan hingga tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan UMKM mencapai 13.075 dengan

²⁰ Sidikkasus. (2020). Pemkab Sidoarjo Bahas RKPD Tahun 2021, Ada 5 Prioritas Pembangunan. Sidikkasus.co.id. Diakses pada tanggal 13 Oktober. 2021. <https://www.sidikkasus.co.id/pemkab-sidoarjo-bahas-rkpd-tahun-2021-ada-5-prioritas-pembangunan.html>

berbagai jenis usaha. Selain itu terdapat 82 sentral industri yang tumbuh dan ditambah lagi sekitar 11 kampung. Dapat dilihat pada tahun 2014 hingga 2017 perkembangan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan pada Pertumbuhan UMKM terus meningkat dengan pesat, hingga pada saat ini telah tercatat 248.306 usaha, dan dapat dilihat pada Tabel I.3.

Kontribusinya yang tinggi terhadap PDRB kabupaten Sidoarjo hal ini menjadikan kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu daerah yang menjadi pusat UMKM di Indonesia yang menjadi sorotan Nasional. Keberhasilan dalam membina koperasi dan UMKM menjadikan Sidoarjo ditetapkan sebagai kota UMKM²¹. Keberhasilan Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat melalui prestasi dalam pengembangan UMKM yaitu meraih penghargaan Natamukti yang diberikan oleh *International Indonesia Council for Small Business (ICBS)* pada tahun 2018. UMKM yang tumbuh pada Kabupaten ini tidak hanya menaungi satu sektor saja, melainkan beberapa sektor dan setiap bidang sentra tersebar pada 18 Kecamatan yang dapat dilihat pada Tabel I.4.

Tabel I.4 Jumlah Perusahaan Industri Pengolahan Besar dan Perusahaan Sedang Menurut Lapangan Usaha 2018

No.	Jenis Industri Pengolahan	Jumlah Perusahaan
1.	Makanan dan Minuman	249
2.	Pengolahan Tembakau	33
3.	Tekstil dan Pakaian Jadi	37
4.	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	74
5.	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Anyaman dari Bambu, Rotan	24
6.	Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	64
7.	Karet, Barang dari Karet dan Plastik	114

²¹ Republikjatim. (2020). Mas Iin : Sidoarjo Bisa Untuk Mengangkat Potensi 206.475 UMKM Kota Delta. Sidoarjo, *republikjatim.com*. Diakses pada tanggal 13 Oktober. 2021. <https://www.republikjatim.com/baca/mas-iin-sidoarjo-bisa-untuk-mengangkat-potensi-206-475-umkm-kota-delta>.

8.	Barang Galian bukan Logam	38
9.	Logam Dasar	25
10.	Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	104
11.	Mesin dan Perlengkapan	32
12.	Alat Angkutan	29
13.	Furnitur	43
14.	Pengolahan lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2019.

Dapat dipahami pada Tabel I.4 menunjukkan bahwa Sidoarjo memiliki banyak sektor industri pengolahan yang hingga saat ini masih berjalan dengan aktif. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan sentra industri pendukung maupun usaha lain disekitarnya. Pada peringkat pertama industri yang berkembang dengan pesat yaitu Makanan dan Minuman dengan jumlah perusahaan 249 unit, diikuti dengan industri Logam Dasar dan Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik yang juga berkembang dengan jumlah perusahaan 129 unit, dan industri terendah yaitu Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Anyaman dari Bambu, Rotan, serta Pengolahan lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan dengan jumlah perusahaan 24 unit. Pada tahun 2018 industri produk logam menyumbang 9,38 triliun rupiah terhadap perekonomian Sidoarjo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2019, lokasi yang paling tinggi memiliki tempat-tempat usaha berada di Kecamatan Waru, dan bidang usaha yang paling banyak tersebar di Kecamatan Waru ialah Industri Logam Dasar dan Barang dari Logam sebanyak 37 unit. Maka dapat disimpulkan bahwa industri yang sedang melonjak pesat pada saat ini selain industri produk makanan dan minuman yaitu industri Logam Dasar dan Barang dari Logam yang berada di Kecamatan Waru Desa Ngingas, atau lebih sering disebut sebagai Kampung Logam.

Sentra industri logam di desa Ngingas kecamatan Waru yang telah berdiri sejak 1930-an. Pada tahun 1951 pelaku usaha yang bergerak dalam sektor industri pande besi mulai membentuk jaringan kelompok usaha dengan nama Persatuan Pande Besi Islam Indonesia (PPII), yang kemudian berganti Koperasi Pande Besok (KOPANDE) pada tahun 1955. Pembentukan kelompok bertujuan untuk mengikat para perajin dan pelaku usaha dalam satu organisasi guna meningkatkan jiwa usaha, memperluas pemasaran, dan juga ekonomi masyarakat sekitar. Dengan adanya kerjasama yang baik, pelaku usaha pande besi dapat melakukan pengembangan dalam produk yang telah merambah ke pasar nasional, maupun toko-toko besar yang ada di wilayah Surabaya, dan juga proses produksinya yang lebih efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi produksi mesin manual. Selain adanya perubahan terhadap produksinya, pelaku usaha ini juga melakukan reorganisasi koperasi baru yang dibentuk pada tahun 1978 dengan nama Koperasi Waru Buana Putra²².

Desa Ngingas memiliki ratusan industri kecil yang dibangun oleh pengusaha kecil dan menengah, sehingga kerajinan logam pada desa Ngingas ini dikelola oleh sebagian besar masyarakat tersebut. Kegiatan mengolah logam merupakan bagian dari kegiatan rumah tangga yang berkembang menjadi industri keluarga atau bisa dikatakan sebagai bisnis turun menurun. Dengan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan dari para pelaku sentra pande besi ini, Desa ngingas berhasil merangsang perekonomian setempat maupun diluar dari daerahnya seperti Dusun Oro-oro Ombo, Ambengan, Pandean, dan beberapa dusun lainnya yang juga dapat menciptakan bahan dasar besi dan juga produk logam menjadi komponen otomotif, alat rumah tangga yang berbahan dasar besi, komponen alat elektronik, bahkan komponen untuk amunisi bagi perusahaan senjata²³.

²² Yulianto, Hendra D. (2021). Sentra Industri Pengolahan Logam Waru Sidoarjo Tahun 1978-2017. Sidoarjo. Avatar, *e-Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 10, No.2.

²³ Surabaya Newswave. (2016). Sidoarjo Layak Menjadi Kota UKM Indonesia. Sidoarjo. Surabayanewwave.com. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2021. <http://www.surabayanewwave.com/2016/10/sidoarjo-layak-menjadi-kota-ukm.html>

Melihat adanya potensi yang besar pada Desa Ngingas pemerintah mempopulerkan Desa Ngingas sebagai Kampung Logam dengan tujuan memberikan label pada pasar nasional. Kabid Perekonomian BAPPEDA Sidoarjo Trisnanto Edi Wibowo juga melakukan beberapa kajian dalam pemilihan lokasi objek wisata industri dan telah memilih beberapa lokasi yang tepat, salah satunya yaitu Kampung Logam. Kampung Logam memiliki daya tarik dan juga keunggulan tersendiri, sehingga pemerintah akan melakukan revitalisasi kampung usaha rakyat dengan melakukan pelebaran jalan, membangun lahan parkir, dan juga menjadikan kawasan Industri logam Ngingas sebagai kawasan wisata edukasi yang nantinya pengunjung dapat melihat proses pembuatan logam²⁴. Selain itu pemerintah juga memfasilitasi dengan membuat gapura yang bertuliskan “Selamat Datang di Kampung Logam Desa Ngingas Kecamatan Waru” di depan jalan masuk kampung logam tersebut²⁵.

Kampung logam binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo di Desa Ngingas mengalami perubahan yang semakin modern dalam proses pembuatan kerajinan logam. Salah satunya yang terjadi pada PT Elang Jagad yang merupakan salah satu usaha besar dalam memproduksi berbagai kerajinan logam. Pada tahun 2001 PT Elang Jagad dalam proses menciptakan kerajinan logam hanya menggunakan cara manual tanpa mesin. Sejak tahun 2013 dengan adanya dukungan melalui program pendamping dan pelatihan yang dilakukan oleh Disperindag dan juga menggandeng Lembaga Pengembangan Bisnis Yayasan Dharma Bhakti Astra (LP YDBA) Waru, PT Elang Jagad dapat melakukan pengembangan pada produknya, seperti tungku kompor gas, perkakas rumah tangga, komponen kendaraan, serta berbagai macam produk berbasis logam. Sedangkan pada alat produksinya, para perajin logam juga telah memanfaatkan teknologi tinggi sebagai mesin produksi sebagaimana telah

²⁴Jawa Pos. (2017). Jadi Destinasi Wisata Baru. Sidoarjo. Pressreader.com. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2021. <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20170916/282484298931878>

²⁵ Kusumawardana, Danendra. (2018). Bermula Dari Pandai Besi, Kini Ngingas Sidoarjo Jadi Sentra Industri Logam. Sidoarjo. surya.co.id. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2021. <https://surabaya.tribunnews.com/2018/02/14/bermula-dari-pandai-besi-kini-ningas-sidoarjo-jadi-sentra-industri-logam>

digunakan oleh Bapak Haji Samsul pemilik PT Aji Batara Perkasa (ABP) yang memiliki jasa industri cetakan (*moulding*), dan juga memiliki mesin bubut yang dapat dioperasikan dengan komputer atau yang dapat disebut sebagai CNC (*computer numerically controlled*), mesin untuk mengamplas secara otomatis, pemotongan plat besi dengan mesin, hingga pengecatan produk yang berbasis logam. Mesin-mesin yang digunakan juga berkualitas karena didatangkan dari dalam negeri maupun luar negeri. Meskipun, para perajin maupun pelaku usaha pande besi telah menggunakan teknologi tinggi tetapi mesin manual juga masih dibutuhkan karena kualitas dari mesin manual jauh lebih kuat, dan juga adanya meminimalisir biaya pada listrik. Adanya pemanfaatan ini juga didorong dari permintaan pasar yang tinggi dan juga kebutuhan pasar yang semakin meningkat, maka pengrajin maupun pelaku usaha memiliki inovasi yang efektif dan efisien dengan memadukan mesin yang berteknologi tinggi dan juga mesin manual untuk mendapatkan hasil yang berkualitas²⁶.

Berbagai keunggulan dan juga potensi industri logam dari Desa Ngingas, pemerintah memberikan fasilitas dan juga membina pelaku usaha pande besi. Kementerian Perindustrian memberikan kontribusi terhadap Kampung Logam dengan memberikan kegiatan atau bimbingan yang menunjang secara teknis maupun fasilitas, seperti program restrukturisasi mesin dan peralatan Industri Kecil Menengah (IKM), dimana para pelaku usaha pande besi akan mendapatkan potongan harga atas mesin maupun peralatan produksi yang dibelinya. Selain itu Kemenperin juga memberikan fasilitas sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditunjukan bagi para sumber daya manusia IKM. Kemenperin juga menyediakan *material center* melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang nantinya akan memudahkan IKM untuk mendapatkan akses bahan baku, dan juga menjadi salah satu solusi bagi IKM yang masih mengalami kendala dalam bahan baku yang masih sulit untuk dijangkau²⁷.

²⁶ Herawati, R. (2014). Mendorong Peran Perguruan Tinggi Dalam D Alam Meningkatkan Inovasi Dan Keterkaitan Antar Aktor Di Sentra Industri Logam Ngingas. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*. Bandung: SAPPK ITB.

²⁷ Kemenperin. (2017). Sentra IKM Logam Ngingas Pasok Komponen ke Manufaktur Besar. Kemenperin.go.id. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2021.

Adanya upaya-upaya ini berdampak positif bagi PT Elang Jagad dan pelaku usaha lainnya seperti UD Karya, UD KS PRO, dan juga CV Borneo Putra. Kegigihan dan konsistensi dari para pengrajin logam dalam mempertahankan kualitas produk olahan logam, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidoarjo semakin mematangkan kembali aspek pada kampung logam yang berada di desa Ngingas ini, dengan menekankan pada aspek manusia, aspek produksi dan permodalan. Adanya kolaborasi yang matang dalam membangun desa ini, pada tahun 2017 usaha pelaku UMKM mencapai keberhasilannya dengan memproduksi 80.000 unit komponen otomotif yang akan dikirim ke PT Rachmat Perdana Adhimetal selaku tier satu PT Astra Honda Motor, dengan total pemesanan komponen otomotif sebanyak 200.000 unit²⁸. Gati Wibawaningsih juga menyampaikan bahwasanya IKM logam memiliki potensi pasar yang tinggi pada sektor kendaraan, karena jumlah produksi maupun penjualan kendaraan mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan pada sektor otomotif, menjadikan suatu peluang bagi IKM logam untuk memenuhi pasar komponen otomotif, perusahaan manufaktur dan purna jual dengan menciptakan produk-produk komponen otomotif yang berkualitas.

Dalam kesuksesan untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kampung Logam, masih ditemukan beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi pelaku usaha maupun masyarakat setempat. Pada tahun 2019 pelaku usaha yang ada di Desa Ngingas mengalami penurunan pendapatan hingga 40%, hal ini terjadi karena mudahnya barang impor yang di datangkan dari China masuk ke Indonesia dengan jumlah yang banyak dan harga yang lebih murah, sehingga para pelaku usaha ini kesulitan untuk bersaing dengan barang impor. Barang dari China relatif lebih murah karena bahan baku plat besi yang dijual hanya Rp 9.000 per kg, sedangkan di Indonesia bahan baku plat besi yang dijual mencapai Rp 11.500 per kg. Hal ini tentu mempengaruhi harga jual produk-produk yang dijual oleh Desa

<https://kemenperin.go.id/artikel/17185/Sentra-IKM-Logam-Ngingas-Pasok-Komponen-ke-Manufaktur-Besar>

²⁸Warta Ekonomi. (2017). Kemenperin Inisiasi Pembentukan Material Center. Sidoarjo. Wartaekonomi.co.id. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2021 <https://www.wartaekonomi.co.id/read132219/kemenperin-inisiasi-pembentukan-material-center.html>

Ngingas dan pasar yang semakin menyempit²⁹. Kesulitan dalam mencari bahan baku besi plat telah berlangsung sejak tahun 2017.

Pada tahun 2020 Industri Logam yang ada di Desa Ngingas menjadi salah satu industri yang terkena dampak Covid-19, dimana pelaku bisnis mengalami kesulitan pada masa pandemi. Kelesuan pada industri logam menyebabkan beberapa dampak pada pelaku usaha seperti, pelaku usaha sulit untuk menggaji karyawan karena pendapatan produksi logam turun hingga 80%, produktivitas dalam memproduksi logam juga rendah, yang awalnya dapat memproduksi logam sebanyak 10 ton dalam lima hari dengan jumlah pemesanan per harinya dua ton, saat ini hampir tidak ada pemesanan. Serta kebijakan pemerintah terkait pembatasan akses jalan di beberapa wilayah mengakibatkan tertundanya pengiriman produk logam sebanyak 350 pcs aksesoris sepeda motor dan 14 ribu pcs cetak kompor ke Jakarta, sehingga pembayaran dari produk terkait juga tertunda. Dampak dari Covid-19 masih berlanjut hingga tahun 2021. Fenomena ini merupakan permasalahan baru bagi masyarakat maupun pelaku usaha pande besi yang mengakibatkan keterbatasan pemesanan dari konsumen tetap maupun konsumen baru, kesulitan dalam melakukan pengiriman produk karena adanya keterbatasan akses jalan di beberapa wilayah, dan masyarakat yang bekerja juga mengalami penurunan pendapatan hingga 50%³⁰.

Selain permasalahan yang ada pada masyarakat, ditemukan adanya masalah yang berkaitan dengan pemerintah yang seharusnya mendukung upaya masyarakat dalam membangun UMKM. Dalam mendirikan sebuah usaha, dibutuhkan adanya izin usaha yang bersifat legal guna memberikan payung hukum terhadap usaha, pemenuhan syarat dalam mengajukan modal usaha pada

²⁹ Irwan, SY. (2019). Omzet Turun, Perajin Logam Desa Ngingas Sidoarjo Keluhkan Mudahnya Barang Impor Masuk Indonesia. Sidoarjo. Surya.co.id. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2021. <https://surabaya.tribunnews.com/2019/08/03/omzet-turun-perajin-logam-desangingas-sidoarjo-keluhkan-mudahnya-barang-impor-masuk-indonesia>

³⁰ Baehaqi. I. (2021). KKN UNTAG 1945 Surabaya: Pembuatan Peta Industri Untuk Perkenalkan Sentra Industri Pada Kampung Logam Dusun Pandean. Sidoarjo. *Kompasiana.com*. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2021. <https://www.kompasiana.com/imambaehaqi0078/5fef3903d541df407e571334/kkn-untag-1945-surabaya-2020-gasal-perancangan-dan-pembuatan-ulang-peta-industri-untuk-memperkenalkan-sentra-industri-pada-kampung-logam-dusun-pandean-rw-04-desa-ningas-kecamatan-waru-kabupaten-sidoarjo?page=all#sectionall>.

lembaga perbankan, dan syarat untuk dapat mengikuti berbagai tender yang nantinya usaha menerima permintaan barang dan akan melakukan proses produksi. Dokumen ini menjadi salah satu dokumen wajib yang harus dimiliki bagi setiap pelaku usaha untuk dapat melakukan aktivitas usaha. Tetapi pada tahun 2014 para pelaku usaha logam di Desa Ngingas mengalami kesulitan dalam mengajukan izin usaha kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dianggap melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penolakan ini mengancam ratusan usaha industri logam yang ada di Desa Ngingas, sehingga pelaku usaha tidak dapat melakukan aktivitas kerjanya dan secara terpaksa menghentikan kegiatan dalam memproduksi logam. Salah satu pelaku usaha yang mengalami penolakan yaitu Samsul Anam, ketika hendak mengajukan CV Aji Bathara Perkasa Mandiri dengan kelengkapan persyaratan berkas seperti foto copy KTP, surat keterangan usaha, akta notaris, dan perizinan usaha yang telah ditandatangani oleh warga setempat dan juga Kepala Desa Ngingas, tetapi BPPT tetap menolak³¹. Dengan adanya permasalahan terkait izin usaha, masyarakat merasa usaha mereka dimatikan karena dianggap melanggar Perda RT/RW. Meskipun masalah ini telah diberikan solusi dengan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat Desa Ngingas, tetapi hingga saat ini masyarakat masih mengalami hambatan. Menurut Haji Masnuh selaku pelaku usaha pande besi mengatakan bahwa dari ratusan usaha pande besi yang ada di Desa Ngingas hanya sekitar 20% hingga 30% saja yang memiliki izin usaha³². Keluhan ini telah diterima oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo dan Edi Kurniadi selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo akan memastikan

³¹ Duta Masyarakat. (2014). BPPT Tolak Izin Usaha Warga Ngingas. Sidoarjo. *Duta Masyarakat*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021. https://issuu.com/arohman/docs/1511_sabtu_duta_composite/12. Hal 12.

³² Yuana, L. (2020). Haji Masnuh 'Masnur & Son': Menempa Sekeping Harapan Di Kampung Logam.Sidoarjo.*Timesindonesia.co.id*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021..<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/249758/haji-masnuh-masnur--son-menempa-sekeping-harapan-di-kampung-logam>.

kemudahan dalam mengurus izin usaha bagi pelaku UMKM yang bertujuan meningkatkan perekonomian daerah di masa pandemi Covid-19³³.

Pada pandemi Covid-19 pelaku usaha pande besi maupun masyarakat sangat membutuhkan adanya bantuan tersebut untuk dapat tetap bertahan hidup dan juga mempertahankan usahanya. Untuk dapat membantu UMKM di masa pandemi pemerintah memiliki beberapa program yang bertujuan untuk menanggulangi krisis ekonomi, seperti memberikan bantuan modal. Pertama, memberikan bantuan modal melalui dana bergulir untuk modal pengembangan usaha bagi pelaku UMKM, namun sangat disayangkan masyarakat masih banyak menyalahgunakan program ini sehingga berdampak pada kredit macet. Disamping adanya penyalahgunaan daya, program ini memberikan kemudahan dalam bantuan permodalan, tetapi hanya sekitar 10% hingga 20% usaha yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah³⁴.

Dalam meningkatkan proses pembangunan yang terarah serta tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, pemerintah juga telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dimana kebijakan ini memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya pembangunan merupakan suatu upaya dalam meningkatkan martabat bangsa dengan cara mengurangi angka kemiskinan, memberantas pengangguran dengan upaya membuka lapangan kerja sebesar-besarnya, dan memperkecil adanya diskriminasi terhadap ketimpangan sosial³⁵. Hal ini merupakan suatu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan kearah yang lebih baik melalui beberapa proses yang terstruktur dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dinamis, produktif, terampil, dan dapat

³³ Pratiwi. F. (2020). Pemda Sidoarjo Pastikan Kemudahan Izin UMKM. Surabaya. *Republika.co.id*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qcbx62457/pemda-sidoarjo-pastikan-kemudahan-izin-umkm>.

³⁴ Yuana, L., loc.it.

³⁵ Sugiarto, A., & Mutiarin, D. (2017). Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Daerah. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 1–38 <https://doi.org/10.18196/jgpp.4170>.

menguasai ilmu pengetahuan dan juga teknologi dengan dukungan kerjasama industri dan talenta global untuk dapat mengembangkan kegiatan ekonomi, juga dalam meningkatkan kesejahteraan sosial³⁶.

Pengembangan UMKM merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, atau masalah melebarnya kesenjangan distribusi antar sektor atau pelaku usaha, dan juga proses pembangunan yang tidak merata. UMKM memiliki potensi yang strategis dalam meningkatkan ekonomi nasional yang lebih produktif dan mandiri dan juga merupakan aktivitas usaha yang didirikan oleh masyarakat, baik berbentuk usaha perorangan maupun badan usaha. Menurut Rana & Tiwari (2014) dalam buku Kontribusi UMKM terhadap Kesejahteraan Masyarakat menyebutkan bahwa UMKM dapat memberikan peluang untuk mempromosikan usahanya dan juga memberikan kesempatan kerja selain turut andil dalam pendapatan ekspor maupun pertumbuhan inklusif. Hal ini menjadikan UMKM sebagai kontributor yang berpengaruh karena membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar, dan juga tempat lahirnya inovasi dan kewirausahaan³⁷. Semakin banyak masyarakat yang berwirausaha maka akan semakin meningkat perekonomian daerah tersebut, karena UMKM akan memanfaatkan sumber daya lokal, pekerja lokal, dan pembiayaan lokal dapat terserap dan bermanfaat secara optimal. Selain itu, sistem dalam pendanaan UMKM menggunakan dana pribadi dalam penyesuaian produksinya dan berdampak pada usaha berskala kecil yang mampu berkembang dengan modal sendiri sehingga tidak bergantung pada pinjaman luar dalam mata uang asing. Hal ini yang dapat menghindari UMKM dari keadaan krisis. UMKM menjadi sektor usaha yang aktif terlibat dalam pertumbuhan ekonomi maka hal ini

³⁶ Kompas. (2019). Fokus Indonesia Pada 2020 – 2024 : Pembangunan Sumber Daya Manusia. *Kompas.com*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021. <https://adv.kompas.id/baca/fokus-indonesia-pada-2020-2024-pembangunan-sumber-daya-manusia/>.

³⁷ Alansori, A. (2020). Kontribusi UMKM terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Yogyakarta. Penerbit ANDI.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=mzYNEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=umkm+untuk+kesejahteraan+masyarakat+&ots=HFR7iqNKvz&sig=gDGJWk8BVvzJqpkNcWje0mc6o60&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. Hal. 1.

penting dan harus dijaga dalam kestabilan perekonomian nasional yang nantinya akan berdampak juga pada kesejahteraan sosial.

Dengan adanya pemaparan fenomena diatas dapat dipahami bahwa Pemerintah Sidoarjo masih belum mampu mengoptimalkan kinerjanya dalam mendukung pemberdayaannya terhadap UMKM yang ada di kampung logam Desa Ngingas. Mengingat bahwa Pemerintah Sidoarjo menjadi harapan satu-satunya bagi masyarakat maupun pelaku usaha pande besi dimasa pandemi Covid-19, serta kondisi kampung logam yang sangat membutuhkan adanya peran dari Pemerintah Sidoarjo yang dapat memberikan pengawasan, pengarahan, pembinaan terkait pengentasan masalah dalam usaha maupun kualitas dan kuantitas SDM³⁸, keuangan atau bantuan sosial agar tidak digunakan secara konsumtif dan terhindar dari adanya kredit macet. Selain dalam bidang kualitas dan kuantitas, pelaku usaha juga masih sangat membutuhkan adanya bantuan dalam bidang pemasaran. Dalam menghindari gulung tikar UMKM di kampung logam, selain bantuan modal usaha pelaku usaha juga masih membutuhkan pemasaran melalui media teknologi untuk meningkatkan pendapatan, tetapi dalam industri ini masih banyak ditemukan pelaku usaha yang tidak memahami bagaimana teknik pemasaran (*branding*) dengan memanfaatkan teknologi guna menghadapi revolusi industri 4.0³⁹.

UMKM telah menjadi program utama Pemerintah yang berperan sebagai tulang punggung dari perekonomian, maka seharusnya Pemerintah Sidoarjo dapat memetakan secara adil terkait prioritas program dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Berangkat dari Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bantuan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih sebatas formalitas dan program-program pemberdayaan UMKM di Sidoarjo masih belum dijalankan secara merata sehingga masih banyak pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sidoarjo tidak

³⁸ Yuana, L. loc.it.

³⁹ Nugroho, A. (2020). UMKM Butuh Ketrampilan Dan Pemasaran. Sidoarjo. *Radarsurabaya.jawapos.com*. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2021. <https://radarsurabaya.jawapos.com/sidoarjo/23/01/2020/umkm-butuh-ketrampilan-dan-pemasaran/>.

mengetahui program-program yang dijalani oleh pemerintah. Kampung logam memiliki potensi yang besar bagi perekonomian Kabupaten Sidoarjo hal ini juga telah diakui oleh pejabat yang berkunjung ke kampung logam, tetapi dalam pembinaan tidak dilakukan secara tuntas, dan yang bertahan untuk melakukan pembinaan secara konsisten hingga saat ini hanya Lembaga Pengembangan Bisnis Yayasan Dharma Bhakti Astra (LP YDBA).

Berikut ini adalah uraian penelitian-penelitian sebelumnya dengan tema serupa dan terkait dengan penelitian ini sebagai dasar untuk mengidentifikasi *state of the art*, sebagai berikut:

Tabel 1.5 Pemaparan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil
1.	Luis Pedauga, dkk. (2021)	<i>Macroeconomic lockdown and SMEs: the impact of the COVID-19 pandemic in Spain</i>	Mengukur dampak dari pandemi terhadap UMKM maupun perusahaan besar, serta mengidentifikasi peran dari UMKM maupun perusahaan besar dimasa pandemi.	UMKM memiliki komponen konsumsi menengah yang lebih tinggi sebesar 53% sedangkan perusahaan besar hanya 47%, serta UMKM lebih berdampak pada tuntutan agregat daripada perusahaan besar. Hal ini berlaku untuk kegiatan dalam pelayanan profesional dan bisnis, real estate, dan beberapa sektor manufaktur.
2.	Nawal Abdalla Adam (2021)	<i>Innovation practices for survival of small and medium enterprises (SMEs) in the COVID-19 times: the role of external support</i>	Mengembangkan model teoritis dan memberikan wawasan terkait hubungan antara praktek inovasi dan kinerja UMKM, maupun kelangsungan hidup dengan melihat	Praktik inovasi yang diadopsi oleh UMKM untuk menghadapi dampak dari Covid-19 memiliki dampak positif pada kinerja dan kemungkinan kelangsungan bisnis. Serta, dukungan

			adanya dukungan eksternal	bantuan eksternal memperkuat dampak positif dari praktek inovasi UMKM pada kelangsungan bisnis bukan kinerja. Studi ini memiliki beberapa implikasi praktis yang signifikan bagi para manajer, pemerintah, dan pembuat kebijakan yang telah dinyatakan.
3.	Indah Widyaningtyas, dan Farida Rachmawati (2021)	Dampak Serta Strategi UMKM Saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo	Membandingkan dampak sosial ekonomi UMKM sebelum dan saat pandemi Covid-19 serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan oleh UMKM tas dan koper selama masa pandemi Covid-19.	Jumlah pengunjung, pelatihan, dan hasil penjualan mengalami penurunan serta pengangguran di Desa Kedensari meningkat.
4.	Akpeko Agbevade pada tahun (2020)	<i>Implementation Dynamics of Local Economic Development: Comparative Empirical Experiences From Ghana's Local Governance System</i>	Menguji pernyataan Turner dan Hulme (1997:81) yang menyatakan bahwa politik tidak akan dihapus dari proses implementasi kebijakan, karena dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan adil untuk pengguna sumber daya yang langka, serta menggali dinamika yang membentuk implementasi LED pada tiga daerah yang dapat disebut sebagai Ghana Local Government Units	Implementasi LED dibentuk oleh politik, kepemimpinan politik, kemauan dan komitmen, sistem kepemilikan lahan, mekanisme kelembagaan dan prosedural mempengaruhi implementasi LED yang diterapkan di Accra Metropolitan, Keta Municipal, dan Shai-Osudoku District Assemblies. Sehingga penelitian ini mendukung pernyataan Tuner dan Hulme yang

			(LGUs)	berasumsi bahwa politik berdiri tegak diantara semua dinamika.
5.	Alfian Hidayat (2019)	<i>Development of Seaweed Commodities in West Nusa Tenggara Using the Hexagon Model for Local Economic Development</i>	Dengan menggunakan pendekatan Local Economic Development (LED) model hexagonal dengan melihat 6 dimensi yang mencakup target group, locational factors, policy focus and synergy, sustainability, governance, dan planning	Pemerintah NTB sudah menerapkan LED tetapi masih belum optimal dalam beberapa program yang telah dilakukan seperti pemilihan dalam kelompok target yang dapat disesuaikan dengan kapasitas industrial daerah, penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktivitas ekonomi, adanya kebijakan dan regulasi yang bersifat <i>pro-environment</i> dan <i>pro-poor</i> guna mencapai prinsip pembangunan yang berkelanjutan, kerjasama antar <i>stakeholders</i> , dan upaya pengawasan (<i>monitoring</i>) maupun evaluasi
6.	Gebregizabher Gebreyesus Fiseha dan Akeem Adewale Oyelana (2017)	<i>An Assessment of the Roles of Small and Medium Enterprises (SMEs) in the Local Economic Development (LED) in South Africa</i>	Menilai peran UKM dalam pembangunan ekonomi lokal di negara berkembang dengan lokus Afrika Selatan	UKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi lokal di Afrika Selatan. UKM ini memberikan kontribusi yang besar terhadap masyarakat maupun pemerintah seperti menciptakan lapangan pekerjaan,

				melengkapi kebutuhan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan. Tetapi UKM di negara berkembang masih banyak ditemukan kendala seperti kesulitan pada akses keuangan, kurangnya skill atau keterampilan bisnis, dan kurangnya ruang untuk beroperasi. Masih diperlukan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, swasta dan juga masyarakat sipil dalam meningkatkan kontribusi UKM dalam pembangunan ekonomi daerahnya.
--	--	--	--	---

Berdasarkan uraian di atas, kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu memiliki fokus terhadap UMKM dan implementasi dari *Local Economic Development* (LED). Tetapi penelitian sebelumnya menekankan bagaimana *Local Economic Development* (LED) diimplementasikan dengan mengeksplorasi aktivitas politik, memanfaatkan peran komunitas, memanfaatkan peran UMKM, dan juga bagaimana menilai peran *Local Economic Development* (LED) dalam suatu negara maupun daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi, dan fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan pada UMKM Kampung Logam Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dimana fokus penelitian ada pada bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo melaksanakan LED dalam pengembangan UMKM Kampung Logam Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada masa pandemi Covid-19, yang dilihat melalui konsep LED menurut Andrew Beer

dan Terry Clower (2021) dengan lima strategi yang berpotensi dapat diterapkan untuk merangsang aktivitas bisnis lokal dan dapat mengidentifikasi pendekatan dasar untuk mendorong pengembangan UMKM Kampung Logam Desa Ngingas Sidoarjo. Sehingga dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penelitian terhadap pengembangan UMKM pada Kampung Logam Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo khususnya pada masa pandemi Covid-19, melihat gambaran dari peran Disperindag dalam melakukan pengembangan UMKM Kampung Logam melalui strategi-strategi peningkatan pengembangan UMKM *Local Economic Development*.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka ditemukan rumusan masalah yang telah menjadi fokus pada penelitian ini ialah “Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo melaksanakan *Local Economic Development* (LED) dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kampung Logam Desa Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada masa pandemi Covid-19?”

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan utama yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu mendeskripsikan secara kritis mengenai sejauh mana peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pengembangan pada UMKM Kampung Logam Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo melalui perspektif *Local Economic Development* (LED) pada masa pandemi Covid-19.

I.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara akademis dan juga praktis. Manfaat tersebut antara lain:

I.4.1 Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menyusun rekomendasi dalam upaya peningkatan kualitas kinerja pemerintah Sidoarjo dan sebagai bahan masukan pada penyusunan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM). Hasil dari penelitian ini juga memiliki manfaat akademis yang dapat dijadikan bahan rujukan oleh para peneliti yang akan melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang terkait pengembangan teori maupun wawasan lebih lanjut yang berhubungan dengan *Local Economic Development (LED)* khususnya pada pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui perspektif *Local Economic Development (LED)*.

I.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo, masyarakat di desa setempat, dan pihak terkait untuk terus mendorong strategi-strategi peningkatan pengembangan UMKM khususnya pada Kampung Logam Desa Ngingas Sidoarjo. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi maupun evaluasi dalam hal meningkatkan kualitas kinerja pihak terkait dalam melakukan pengembangan dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perspektif *Local Economic Development (LED)* secara lebih efektif dan juga tepat sasaran.

I.5 Kerangka Konseptual

Terkait dengan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penulis menggunakan paradigma *New Public Management (NPM)* dengan pemikiran Donald C. Menzel, dkk (2015). Secara teoritis menurut OECD (1998) NPM merupakan paradigma baru yang menggabungkan praktik manajemen modern dengan logika ekonomi, dengan mempertahankan nilai inti dari pelayanan publik. Hughes (2003) berasumsi bahwa reformasi manajemen publik telah didorong oleh teori dasar yang berbeda dengan menyebutkan bahwa motivasi ekonomi dapat diasumsikan untuk semua aktor di pemerintahan, fleksibilitas manajemen swasta memberikan pelajaran bagi pemerintah, serta politik dan administrasi tidak dapat dipisahkan.

Dalam NPM sebagai riset bidang akademik merupakan evaluasi efektivitas tata kelola dalam pencapaian tujuan, menganalisis seluruh rangkaian tindakan pemerintah dan pengaruh lain yang telah berkontribusi pada hasil yang telah dicapai. Paradigma ini memberikan jalan yang lebih bermanfaat untuk memahami

tindakan yang berhasil dan yang tidak dalam pemerintahan modern. Penetapan tujuan dalam paradigma ini dilihat secara lebih luas, sehingga analisis dalam tindakan pemerintah tidak hanya berfokus pada *output* saja, tetapi kemungkinan juga terdapat unsur-unsur dan prinsip-prinsip yang mendasari terciptanya *output*. NPM dipandang sebagai perpaduan ideologi politik, teori ekonomi, dan praktik manajemen sektor swasta untuk membentuk sistem paradigma baru⁴⁰.

1.5.1 Community Economic Development (CED)

Community Economic Development (CED) merupakan suatu metode dalam pengembangan ekonomi lokal yang berfokus pada membangun modal masyarakat dengan menciptakan pekerjaan yang produktif bagi penduduk lokal, menyediakan barang dan jasa lokal, memperoleh sumber daya yang merata dengan peningkatan infrastruktur pemerintah, menghasilkan pendapatan baru melalui perusahaan yang dimiliki secara lokal, mengurangi ketergantungan masyarakat pada sumber daya eksternal, serta melibatkan masyarakat dalam proses politik ekonomi pada kota dan regional. Pada hakekatnya, CED adalah suatu gerakan yang didasarkan pada konsep sumber daya dasar dengan meningkatkan peluang dan pendapatan dalam masyarakat, sehingga praktek CED bertujuan untuk mengembangkan, menarik, dan mempertahankan kegiatan ekonomi untuk lokalitas. Praktek CED ditujukan untuk menarik modal dari luar sebagai sarana utama untuk meningkatkan perekonomian daerah atau lokal⁴¹.

Dalam CED diperlukan adanya alat ukur yang ditujukan untuk menangani patologi yang mendasari isu-isu pembangunan ekonomi. Ada tiga jenis alat yang digunakan untuk menghadapi revitalisasi CED, yaitu: (a) pengembangan lokalitas dimana peningkatan karakter fisik dan pemberian insentif ; (b) pembentukan modal manusia dengan meningkatkan tingkat keterampilan dan kapasitas individu untuk mendapatkan pekerjaan atau memulai bisnis untuk melayani komunitas mereka; dan, (c) modal sosial atau pengembangan kapasitas dengan membangun

⁴⁰ Menzel, Donald C. dkk. (2015). *The State Of Public Administration: Issue, Challenges, and Opportunities*. New York: Taylor & Francis. Hal 409.

⁴¹ Blakely, E.J. (2001). *Community Economic Development*. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. New York. <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/04443-0>

lembaga dan organisasi baru yang meningkatkan kapasitas kelembagaan politik dan ekonomi masyarakat untuk mengembangkan dan mengelola sumber dayanya sendiri. Pada dasarnya konsep ini penting untuk menangani kondisi sosial dan fisik lokal agar berhasil memperkenalkan opsi dan peluang ekonomi baru. Selain itu, berpegang teguh pada gagasan bahwa intervensi di masyarakat atau wilayah harus membangun kapasitas baru atau kelembagaan yang memiliki keterampilan politik dan kemampuan ekonomi untuk berurusan secara efektif dengan wilayah yang lebih luas. Pembangunan ekonomi masyarakat yang efektif bertumpu pada pembangunan sumber daya internal masyarakat lokal melalui peningkatan keterampilan dan kapasitas mereka untuk menghasilkan kekayaan ekonomi mereka sendiri.

I.5.1 Local Economic Development (LED)

Local Economic Development (LED) menjadi kunci dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal dengan tujuan membangun kapasitas ekonomi lokal untuk membangun masa depan perekonomian, guna menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup secara merata. Hal ini serupa dengan penelitian dimana penerapan LED di Afrika Selatan memiliki peranan yang penting bagi UMKM dalam berkontribusi menciptakan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan kekayaan lokal⁴². Dalam penelitian LED merupakan proses *bottom-up* yang digerakan oleh aktor lokal dan bekerjasama dengan sumber daya lokal untuk mengembangkan kapasitas ekonomi daerah guna meningkatkan status ekonomi dan kualitas penduduk asli sehingga dapat mengurangi nilai kemiskinan lokal⁴³. Sehingga penelitian yang dilakukan, akan menggunakan konsep LED untuk mendeskripsikan implementasi strategi dari LED melalui pendekatan *endogenous*, serta dapat menilai peranan dari pemangku kepentingan yang terkait dalam objek penelitian ini.

⁴² Fiseha, G. G., & Oyelana, A. A. (2017). *An Assessment of the Roles of Small and Medium Enterprises (SMEs) in the Local Economic Development (LED) in South Africa . Journal of Economics*, 6(3). <https://doi.org/10.1080/09765239.2015.11917617>.

⁴³ Agbevade, A. (2020). *Local Economic Development Implementation*. Ghana: Department of Political Science, University of Ghana, Legon.

I.5.1.1 Pengertian Local Economic Development (LED)

Pada umumnya *Local Economic Development* merupakan suatu konsep yang memiliki tujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan tenaga lokal, dan menciptakan lapangan kerja dengan kondisi yang lebih baik, dengan melakukan pendekatan partisipatif pembangunan dimana pelaku lokal, pemerintah daerah, LSM, masyarakat, dan mitra bisnis melakukan kerjasama⁴⁴. Menurut Blakely dan Bradshaw (2002) *Local Economic Development* menekankan pentingnya elemen lokal dalam perekonomian, karena dalam pembangunan ekonomi berbasis lokal didukung dengan dorongan lapangan kerja, akan memungkinkan keberhasilan jika dijalankan pada tingkat lokal dibandingkan dengan tingkat regional maupun nasional⁴⁵. World Bank (2004) mendefinisikan konsep *Local Economic Development* sebagai tujuan untuk menciptakan kapasitas masyarakat lokal guna meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup secara berkelanjutan untuk masyarakat itu sendiri⁴⁶. Agbevade, dkk (2020) berasumsi bahwa *Local Economic Development* merupakan proses dimana pemerintah daerah, bisnis lokal, dan aktor lain di luar wilayah maupun pemangku kepentingan lainnya menjalin kerja sama dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memicu aktivitas perekonomian di wilayah kota madya, kota kecil, dan juga desa. Sedangkan ILO mendefinisikan *Local Economic Development* secara spesifik sebagai proses partisipasi yang mendorong dan memfasilitasi suatu usaha dengan pemangku kepentingan lokal, serta menyusun strategi dan mengimplementasikan secara bersama-sama yang didasarkan pada penggunaan sumber daya lokal yang

⁴⁴ CLGF. (2019). *Promoting Local Government and Local Economic Development in Southern Africa : Towards the Localisation of the Development Goals*. Commonwealth Local Government Forum.

⁴⁵ Petrevska, L., dkk. (2017). *Understanding Of The Concept Of Local Economic Development*. Hal 3.

⁴⁶ Swindburn, G. (2006). *Local Economic Development: A Primer Developing and Implementing Local Economic Development Strategies and Action Plans*. Washington, D.C: Bertelsmann Stiftung, Gütersloh; The World Bank.

kompetitif untuk mencapai tujuan akhir yaitu menciptakan pekerjaan yang layak dan ekonomi yang berkelanjutan⁴⁷.

Dengan adanya serangkaian definisi diatas dapat dipahami bahwa *Local Economic Development* tidak hanya terbatas pada isu perekonomian yang berkelanjutan, tetapi juga mengedepankan konsep yang luas dengan memiliki acuan pada kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh di tingkat lokal. LED juga menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, bisnis lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerjasama menciptakan kehidupan masyarakat lokal yang berkualitas dengan pengembangan kapasitas, serta memperluas lapangan pekerjaan untuk merangsang aktivitas perekonomian lokal yang berkelanjutan.

Konsep LED sendiri memiliki elemen-elemen yang sama atau dapat disebut sebagai karakteristik dalam melakukan pembangunan ekonomi maupun sosial. Dalam UCLG Policy Paper (2016) menjabarkan karakteristik LED yang meliputi: (1) LED merupakan pendekatan yang partisipatif; (2) Pemerintah daerah memberikan kepemimpinan dan koordinasi dalam perencanaan dan penerapan LED, baik secara langsung atau melalui delegasi lembaga yang berbasis masyarakat; (3) Perencanaan LED mengintegrasikan upaya lintas sektor, mengembangkan ekonomi formal dan informal dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan masyarakat, dan melibatkan kelompok yang terpinggirkan terutama pada pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, maupun masyarakat adat; (4) Inisiatif LED yang variatif sesuai dengan kondisi lokal tersebut. Hal ini meliputi pengembangan infrastruktur, penelitian dan inovasi, pelatihan keterampilan, daya tarik investasi baru, layanan teknis dan keuangan untuk perusahaan baru dan yang sudah ada, serta kebijakan pengadaan dukungan dan dukungan untuk pemasaran; (5) Strategi yang dapat digunakan jangka panjang dengan tujuan untuk mengembangkan komunitas yang inklusif dan tangguh⁴⁸. *Commonwealth Local*

⁴⁷ Rodríguez-Pose, A., & Tijmstra, S. (2005). *What Is LED ?*. London: International Labour Organization (ILO). Hal 3.

⁴⁸ UCLG. (2016). *The Role of Local Governments in Territorial Economic Development*. Barcelona.

Government Forum (CLGF) 2019 menyimpulkan bahwa LED memiliki karakteristik yang meliputi⁴⁹:

1. Pendekatan Endogen (*Endogenous*) Untuk Pembangunan

Pendekatan endogen termasuk dalam pembangunan yang berjangka panjang dengan tujuan menggali potensi lokal secara inklusif dan tangguh, serta menyusun strategi pembangunan guna menciptakan landasan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan kapasitas pembangunan lokal. Untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan endogen menjadi pendekatan yang efektif melalui dukungan seperti pengembangan sumber daya manusia, lingkungan, fisik, serta ekonomi dari suatu lokalitas.

2. Mengambil Pendekatan *Multi-stakeholders*

Pendekatan lokal sebagian besar dibentuk dan dilaksanakan oleh para aktor lokal, tetapi adanya peran aktor-aktor lain dalam pembangunan ekonomi lokal menjadi hal penting dalam meraih keberhasilan tujuan tersebut. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, LED menjadi pendekatan lokal yang bertujuan untuk memberdayakan aktor lokal untuk membentuk masa depan yang lebih baik pada wilayah lokal tersebut. Dengan menerapkan pendekatan *multi-stakeholders* dimana pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil bekerjasama dalam membangun kemitraan, maka upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut akan lebih efektif, efisien dan tepat pada sasaran dalam menciptakan kehidupan sosial dan ekonomi lokal yang lebih baik.

3. Menyediakan Kerangka Kerja Untuk Tata Kelola *Multilevel*

LED memberikan peluang untuk dapat berpartisipasi. Hal ini didasarkan pada pemangku kepentingan bekerja dalam kemitraan secara vertikal dengan tingkat tata kelola yang lain. Selain itu, LED juga meningkatkan pendapatan dan membuka peluang kemitraan antar pemangku kepentingan swasta dan publik lokal serta kelompok sosial dan politik. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai upaya salah satunya pada korporasi ekonomi sosial merespon kebutuhan kelompok termarjinalkan serta UMKM.

4. Bersifat *Multidisiplin*

⁴⁹ CLGF, op. cit. Hal 9

Selain memiliki fokus terhadap pembangunan sosial dan ekonomi, LED juga mengembangkan ekonomi formal dan informal dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, keberlanjutan lingkungan hidup, serta melibatkan kelompok yang termarginalkan terutama pada wanita, remaja, disabilitas, dan masyarakat adat.

I.5.1.2 Strategi Pembangunan Local Economic Development (LED)

Local Economic Development (LED) menekankan pada strategi pembangunan yang tumbuh di dalam negeri dengan memanfaatkan kapasitas dan sumber daya lokal untuk menghasilkan peluang kerja serta meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis lokal (Blakely 1994; Rogerson dan Rogerson 2010). Melalui proses partisipatif yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan dalam satu unit spasial untuk memanfaatkan sumber daya lokal termasuk manusia, kelembagaan dan fisik, untuk pembangunan lokal⁵⁰.

LED memiliki dua pendekatan pembangunan yaitu *exogenous* dan *endogenous*. Pembangunan *exogenous* dapat disebut juga sebagai pembangunan eksternal yang memiliki pendekatan bersifat *top-down*, dimana peran dari pemangku kepentingan lokal dan faktor dari kebijakan moneter maupun investasi asing, menjadi penentu dalam proses pembangunan. Karakteristik utama dalam pembangunan *exogenous* yaitu sebagai tiang pertumbuhan kota, artinya kekuatan utama pembangunan berasal dari luar daerah. Menurut Andrew Beer dan Terry L. Clower (2021) pembangunan *exogenous* memiliki beberapa strategi untuk dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meliputi⁵¹: (1) Perekrutan industri, dengan melakukan penyediaan pemberian uang tunai, penyediaan tanah atau bangunan, pinjaman biaya rendah, pelatihan pekerja yang disesuaikan, keringanan pajak atau subsidi untuk biaya produksi. Tetapi memiliki dampak dan risiko terhadap masyarakat maupun pemerintah yaitu adanya subsidi yang dikenakan; (2) Adanya kebijakan yang mendorong politik, ekonomi, dan sosial; (3) Melakukan penanaman modal asing langsung. Woods (2005) dalam Gkartzios, M dan Lowe,

⁵⁰ Mensah, J. K., dkk. (2019). *The Policy and Practice of Local Economic Development in Ghana*. Ghana: Springer. <https://doi.org/10.1007/s12132-018-9344-5>. Hal 207

⁵¹ Ibid.

P (2019) menyebutkan pembangunan *exogenous* memiliki ketergantungan pada investasi eksternal yang mengakibatkan keuntungan pembangunan yang sering diekspor tidak disebarkan secara lokal, serta pembangunan ini juga bersifat non-partisipatif sehingga akan menciptakan kurangan pertanggungjawaban maupun kontrol atau proses dalam pengambilan keputusan yang demokratis⁵². Dapat dipahami bahwa *exogenous* merupakan strategi yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan termasuk pemimpin politik yang mewakili peluang dalam mencapai keuntungan pembangunan ekonomi dalam jangka waktu singkat, dan tanpa mempertaruhkan modal sektor publik dalam proyek jangka panjang.

Sedangkan pembangunan *endogenous* menurut OECD (2009) pertumbuhan *endogenous* atau endogen merupakan salah satu model pembangunan dimana kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) suatu wilayah berpengaruh terhadap kapasitas wilayah guna dapat berinovasi dan menutup adanya kesenjangan sehingga dapat menciptakan daerah yang lebih maju⁵³. Selain adanya pengembangan kualitas SDM yang berkelanjutan, pembangunan juga dapat didorong dengan peran akuisisi yang berkelanjutan melalui peningkatan intelektual maupun kapabilitas. Untuk dapat mencapai pembangunan ekonomi secara riil, dibutuhkan strategi-strategi yang terstruktur. Strategi pembangunan endogen memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan maupun profitabilitas bisnis secara lokal serta mendorong pembentukan perusahaan baru melalui pendekatan yang bersifat *bottom-up*.

Berdasarkan uraian bentuk pendekatan pembangunan LED diatas, maka yang paling sesuai dan digunakan dalam penelitian di Kampung Logam Ngingas Kabupaten Sidoarjo adalah pendekatan pembangunan *endogenous* dengan pendekatan yang bersifat *bottom-up*. Dimana dalam pendekatan ini berusaha untuk dapat melakukan pengembangan pada sektor UMKM di Kampung Logam Ngingas Kabupaten Sidoarjo melalui pembangunan kualitas intelektual maupun kapabilitas SDM guna meningkatkan pendapatan UMKM di Kampung Logam

⁵² Gkartzios, M., & Lowe, P. (2019). *Revisiting Neo-Endogenous Rural Development*. New York: The Routledge Companion to Rural Planning, Routledge. Hal 4..

⁵³ Beer, A., & Clower, T. L. op. cit. Hal 33-34.

Ngingas Kabupaten Sidoarjo serta terciptanya pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Andrew Beer dan Terry L. Clower (2021) memiliki beberapa strategi dan program yang berpotensi dapat diterapkan untuk merangsang aktivitas bisnis lokal, dan dapat mengidentifikasi lima pendekatan mendasar untuk mendorong pembangunan endogen, yang meliputi⁵⁴:

1. Strategi Sisi Penawaran

Langkah pertama yang dilakukan dengan melakukan pendekatan pada kelompok masyarakat lokal dengan menjadikan tempat bisnis yang lebih baik guna meningkatkan daya tarik lokal maupun para produsen untuk membangun perusahaan pusat, dengan lokasi yang sesuai dengan pasar ritel dan pengelolaan jaringan distribusi. Adanya strategi sisi pasokan menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi permasalahan bisnis lokal. Tahapan dalam strategi sisi pasokan dapat dikelompokkan menjadi tiga yang meliputi:

A. Perencanaan Penggunaan Lahan

Mengorientasikan perencanaan penggunaan lahan untuk pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu cara dasar untuk meningkatkan potensi produktivitas lokal, melalui pemastian pasokan lahan yang memadai untuk pengembangan, termasuk dalam pengembangan industri, komersial, dan perumahan, menawarkan fleksibilitas dalam kisaran lahan yang tersedia, perencanaan untuk memastikan akses yang baik ke jaringan transportasi, serta mengembangkan kawasan industri untuk mengantisipasi permintaan.

B. Penyediaan Infrastruktur

Penyediaan infrastruktur merupakan salah satu fasilitas yang mendorong pertumbuhan lokal. Menurut Andrew Beer dan Terry L. Clower (2021) sejumlah peneliti menunjukan pembangunan infrastruktur khususnya transportasi berdampak positif bagi pertumbuhan masyarakat dalam jangka panjang, tetapi hal ini terhalang dengan dana yang cukup tinggi. Penyediaan infrastruktur yang perlu diperhatikan meliputi jaringan transportasi, pasokan air, telekomunikasi, pengolahan air, dan layanan terkait.

⁵⁴ Beer, A., & Clower, T. L. op. cit. Hal 89-109.

C. Akusisi dan Pelatihan Keterampilan

Pada langkah ini Andrew Beer dan Terry L. Clower (2021) menawarkan pelatihan yang disesuaikan dengan perusahaan lokal yang sudah ada di wilayah tersebut maupun perusahaan yang masuk, melalui adanya pemberian subsidi bagi pekerja yang ingin meningkatkan keterampilannya, membantu gerakan para tenaga kerja lokal untuk memfasilitasi pengembangan industri, meningkatkan pendidikan pada wilayah terkait, melalui pengembangan fasilitas pendidikan lokal yang berkelanjutan dan menyesuaikan kurikulum pendidikan untuk lebih mencerminkan perekonomian daerah.

2. Strategi Sisi Permintaan

Strategi ini memiliki penekanan pada sisi permintaan dengan meningkatkan permintaan pada produksi masyarakat lokal. Strategi sisi permintaan memiliki peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan merek lokal, karena merek (*brand*) merupakan hal penting untuk memasarkan barang dan jasa yang telah dihasilkan oleh kota, maupun daerah, serta menjadi daya tarik bagi investasi. Menurut peneliti pemasaran Byron Sharp dalam buku Andrew Beer dan Terry L. Clower (2021), praktik yang baik dalam pemasaran yaitu dengan memanfaatkan sejumlah wawasan terkait cara konsumen membeli. Selain menelaah cara konsumen membeli, Kavaratzis dan Ashworth (2008) menyebutkan adanya tantangan administratif yang berkaitan dengan keberhasilan penerapan pemasaran (*branding*) lokal yaitu melibatkan peran masyarakat sebagai pendorong kesuksesan. Untuk dapat mencapai keberhasilan Kavaratzis dan Ashworth (2008) menawarkan beberapa strategi yang meliputi:

- a. Melakukan adanya pemahaman pemasaran tempat dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat lokal guna membentuk tujuan yang akan dicapai.
- b. Menetapkan sistem koordinasi kegiatan dan memastikan semua tugas dialokasikan dengan tepat.
- c. Merancang pendekatan jangka panjang yang terstruktur guna menempatkan pemasaran yang sesuai dengan standar praktik dalam melakukan pemasaran.

- d. Perluasan agenda pemasaran tempat untuk menarik pelaku usaha yang potensial, investor, dan pasar masa depan untuk produksi.
- e. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan dan penyampaian strategi *branding*. Masyarakat dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan pemasaran sekaligus *audiens* utama
- f. Mengkaji cara-cara *branding* wilayah guna membentuk kolaborasi dengan kota atau dengan kelompok bisnis lainnya. Dengan adanya strategi ini akan membangun hubungan timbal balik dengan wilayah pusat kota yang akan menguntungkan dalam jangka panjang.
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan upaya pemasaran.
- h. Memiliki layanan internet yang kuat guna menghindari keterlambatan informasi terkait dengan pelanggan. Agar efektif, situs pada *website* tersebut memerlukan serangkaian fitur komprehensif yang sesuai dengan harapan calon pelanggan yang mudah di akses. Situs *website* juga perlu dipromosikan secara luas termasuk strategi yang mengoptimalkan penemuan-penemuan mereka dalam pencarian *website*, serta adanya promosi konvensional dalam bentuk cetak, digital dan media lainnya.

3. Strategi Kelembagaan

Andrew Beer dan Terry L. Clower (2021) menekankan pentingnya pembentukan lembaga organisasi baru atau unit khusus sebagai strategi untuk memajukan pembangunan. Loukaitou Sideris (2000) menyatakan bahwa pembentukan asosiasi pedagang pada wilayah perdagangan merupakan kunci untuk melakukan revitalisasi. Asosiasi berfungsi sebagai sekelompok bisnis yang mengidentifikasi dan mencari solusi terkait isu-isu umum, dan mengembangkan saran tentang bisnis lain yang dapat tertarik ke wilayah tersebut. Asosiasi dapat membangun dan mendorong kreativitas kewirausahaan dengan membantu bisnis-bisnis tersebut untuk tumbuh dan menarik perusahaan baru ke wilayah tersebut. Pemerintah, praktisi dan perencana telah menemukan salah satu cara yang paling efektif untuk mendorong pembangunan yaitu dengan menciptakan tujuan spesifik asosiasi yang didedikasikan untuk pembangunan ekonomi. Dengan adanya

pembentukan asosiasi pedagang, diperlukan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan dan budaya lokal. Strategi kelembagaan dapat dilakukan melalui:

- a. Kemitraan swasta sering diidentifikasi sebagai hal penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Kemitraan swasta di tingkat lokalitas, menghasilkan manfaat yang cukup besar. Dengan keterlibatan kemitraan swasta menjadi salah satu program untuk meningkatkan bisnis lokal serta menjadi jalan utama bagi bisnis lokal untuk berkembang.
- b. Badan khusus memiliki tujuan khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk fokus dalam perencanaan pembangunan ekonomi, dan koordinasi yang lebih baik dalam pemerintah maupun dengan sektor swasta.
- c. Organisasi yang dibentuk dengan tujuan yang jelas, serta membantu lembaga pemerintah dalam merangkul isu-isu inklusi sosial, perlindungan lingkungan, dan pembangunan ekonomi.
- d. Pengaturan badan khusus harus sesuai dengan isu masalah lokal. Solusi lokal menjadi solusi terbaik untuk tantangan di tingkat masyarakat, tetapi beberapa isu bersifat regional, dan memerlukan kolaborasi dalam skala yang lebih luas.
- e. Dalam melakukan manajemen organisasi harus merangkul dan mencerminkan masyarakat luas, guna menciptakan peluang lebih lanjut untuk memasuki pasar baru dan lebih memahami berbagai peluang ekonomi pada regional maupun skala yang lebih luas.

4. Pengembangan Perusahaan Baru

Strategi pengembangan perusahaan baru menjadi strategi yang dapat meningkatkan jumlah bisnis baru serta meningkatkan kelangsungan hidup masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi lokal (Lichtenstein dan Lyons 2001; Derbyshire 2012). Adanya dorongan dalam mengembangkan satu perusahaan atau lebih dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal akan memberikan pertumbuhan yang besar pada ekonomi lokal. Perencanaan ekonomi memiliki dua tantangan mendasar dalam skala lokal yaitu mendorong bisnis baru (*startup*), dan memastikan kemakmuran bisnis. Tugas pembangunan ekonomi memiliki dua dimensi yaitu: (1) Memerlukan peningkatan jumlah perusahaan baru yang

didirikan pada wilayah lokal; (2) Meningkatkan tingkat kelangsungan hidup di antara pendatang baru dalam kegiatan komersial dan industri.

Pembentukan usaha baru merupakan hasil dari pembuatan lapangan kerja. Loveridge and Nizalov (2007) berasumsi bahwa wilayah dengan proporsi usaha kecil yang lebih tinggi memiliki tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang lebih baik, tetapi dampak ini bergantung dengan campuran bisnis di wilayah tersebut. Berikut beberapa strategi untuk meningkatkan kompleksitas bisnis baru, yang mencakup:

A. Saran Manajemen dan Layanan Informasi

Pembentukan saran manajemen pada bisnis yang ada merupakan upaya pembangunan ekonomi pada skala lokal. Pengembang ekonomi berupaya mendorong pertumbuhan dengan membantu individu mendirikan bisnis baru dan mempertahankan perusahaan itu dalam jangka panjang. Menurut Lichtenstein dan Lyons (2001) misi utama dalam pengembangan usaha harus dapat mengembangkan wirausahawan. Penerapan pemberian saran dalam bisnis memiliki manfaat dalam pengentasan tantangan yang muncul seraya waktu berlalu dan secara perlahan akan lebih mudah teratas. Akan tetapi, permasalahan pengelolaan sumber daya dan pemasaran terus muncul. Pentingnya pengetahuan, dan modal manusia menjadi unsur utama untuk keberhasilan dalam pembentukan bisnis baru (Bates et al. 2011).

B. Pendampingan dan *Economic Gardening*

Program *mentoring* yang diberikan pada *startup* yaitu dengan akses konsultasi kepada bisnis senior, dengan harapan berbagi saran dan pengetahuan bisnis yang akan membantu perusahaan baru. Program tersebut dapat menjadi efektif, dan mencerminkan inisiatif dalam perusahaan besar, serta membantu wirausahawan baru menyesuaikan diri dengan tantangan manajemen bisnis kecil. Menurut Kutzhanova et al. (2009) skema pembangunan bisnis akan berhasil karena melibatkan campuran profesional dan pelatih sebaya. Melalui skema *mentoring* ini para pengusaha akan belajar, memperoleh keterampilan khusus, dan menjadi lebih termotivasi untuk mencapai keberhasilan.

Economic gardening menjadi pendekatan untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan fokus merangsang aktivitas kewirausahaan sebagai pendekatan bisnis baru, dengan fase usaha yang berpotensi dan produktif. Menurut Braun et al. (2014) '*gardening*' merupakan pendekatan berbasis usaha kecil dengan strategi yang lebih kuat untuk mencari peluang bisnis. Tujuan *economic gardening* adalah untuk mempercepat pertumbuhan bisnis melalui penyediaan informasi tentang pasar tempat bisnis tersebut berjalan, mengembangkan hubungan dengan sumber utama modal intelektual, membangun hubungan dengan perusahaan lain, dan mengembangkan inovasi produk.

C. Klub Bisnis

Dalam kota dan daerah perencanaan pembangunan maupun pengembangan ekonomi telah membentuk kelompok bisnis lokal yang menawarkan kesempatan untuk saling berbagi pengalaman, belajar dari satu sama lain dan mengembangkan inisiatif bersama. Peran ini tidak dipimpin oleh lembaga pembangunan ekonomi, tetapi berhubungan dengan pelaku bisnis lokal. Dengan pembentukan klub bisnis di wilayah bisnis diharapkan dapat merangsang kegiatan ekspor, meningkatkan kemampuan dalam bidang bisnis, meningkatkan pengetahuan tentang peluang bisnis dan meningkatkan manajemen bisnis.

D. Inkubasi Bisnis

Inkubasi bisnis merupakan proses pembinaan usaha kecil dalam mengembangkan produknya didukung dengan inkubator bisnis yang berperan sebagai fasilitator usaha dan pendukung manajemen dan teknologi. Inkubator bisnis merupakan agen spesialis yang dapat menyediakan tempat, fasilitas penunjang produksi dan yang berkaitan dengan bisnis baru. Tersedianya inkubator dengan penyediaan saran kepada bisnis baru dan membantu bisnis dalam membangun diri di pasar diharapkan bisnis tersebut akan berhasil setelah periode tetap dan dapat berkembang ke tempat yang lebih besar. Inkubator bisnis dikembangkan untuk membantu penciptaan lapangan kerja dengan catatan geografi inkubator bisnis mencerminkan dorongan dari kelompok bisnis yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

5. Strategi Transformasional

Transformasi strategi berusaha untuk membentuk kembali dinamika ekonomi lokal dengan menyatukan pasokan, permintaan dan proses kelembagaan untuk mendorong pertumbuhan. Pada era modern, strategi transformasional umumnya melibatkan teknologi, selain itu strategi transformasional juga memanfaatkan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan ekonomi lokal guna tercapainya tujuan baru dalam mengubah produk lokal barang dan jasa menjadi barang yang berkembang.

OECD (2005) mengamati bahwa tiga strategi yang sering diterapkan berupaya untuk mengubah ekonomi lokal yaitu: (1) program untuk mendorong pengembangan teknologi dalam pengembangan lahan dengan tujuan khusus seperti teknologi atau *business park*; (2) kebijakan kluster; (3) upaya untuk menghubungkan penelitian dan industri. Langkah-langkah untuk mendorong pembangunan industri melalui inovasi dapat diciptakan dengan memiliki tingkat kecakapan teknologi, serta bisnis lokal yang memiliki kapasitas untuk inovasi (OECD 2005). Tetapi strategi ini tidak selalu berjalan pada masyarakat daerah yang kurang berkembang. Kesulitan dalam melakukan pemerataan, menunjukkan bahwa bisnis yang bekerja di daerah memerlukan alternatif untuk dapat mengikuti perkembangan, hal ini dapat dilakukan melalui:

A. Taman Teknologi atau Taman Bisnis

Taman teknologi menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi untuk menyediakan lingkungan yang mendukung inovasi perusahaan. Taman teknologi atau taman bisnis menjadi salah satu inisiatif untuk berbagi ruang dalam menghasilkan ide baru dan penyebaran inovasi. Taman teknologi atau taman bisnis dapat bekerja paling baik ketika mereka membangun kekuatan teknologi yang ada dalam penelitian dan manufaktur yang maju, kemudian akan memerlukan sumber daya publik yang cukup besar selama periode yang diperpanjang.

B. Kluster

Porter (1994) berpendapat bahwa di era kontemporer, daerah bersaing memberikan lingkungan hidup untuk pertumbuhan dan kondisi yang ditemukan di dalam kota, wilayah, dan masyarakat menghasilkan keunggulan kompetitif, serta

menopang industri dan bisnis yang berhasil dalam skala nasional maupun global. Konsep klaster Porter menekankan tiga pendorong utama pertumbuhan yaitu: (1) kedekatan geografis antara perusahaan; (2) adanya keterkaitan lintas sektor dalam perekonomian suatu wilayah; (3) sejauh mana industri menggunakan teknologi dan pendekatan terkait. Porter juga membedakan antara bisnis yang bersifat lokal (ritel), bisnis yang terkonsentrasi pada industri yang terpapar perdagangan seperti manufaktur, jasa keuangan, dan lain-lain, dan industri berbasis sumber daya alam seperti pertambangan batu bara, kehutanan.

Pada analisis pengembangan kebijakan, Porter menempatkan kepentingan terbesar pada industri yang diperdagangkan karena terkonsentrasi secara spasial, dan tidak seperti industri berbasis sumber daya alam, lokasinya dapat dibentuk oleh tindakan dan perencanaan manusia. Secara kritis, keberhasilan inisiatif klaster harus dinilai berdasarkan dengan yang terjadi di sektor yang diperdagangkan secara riil (Ketels 2013). Porter (1990) berpendapat bahwa daya saing suatu wilayah didasarkan pada empat faktor utama yang dipaparkan sebagai empat titik *diamond*:

- a. Lingkungan yang mendukung untuk strategi dan persaingan yang kuat;
- b. Kondisi permintaan yang kuat untuk barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan;
- c. Industri terkait dan penunjang;
- d. Kondisi produksi yang baik, termasuk infrastruktur dan sumber daya manusia.

Pada titik *diamond* Porter hal yang paling penting untuk dapat dilakukan adalah pemerintah dapat dan harus campur tangan di skala lokal atau regional untuk memberikan dorongan pertumbuhan. Seperti yang dicatat oleh OECD (2005 hal 33) yaitu pendukung kluster mengklaim bahwa mereka mendorong spesialisasi dalam berbagai kegiatan terkait yang membutuhkan dalam berbagai kemampuan yang berorientasi pada pasar. Pembangunan klaster sesuai dalam kelompok dan wilayah yang berkomitmen untuk berubah, dengan prospek dan langkah-langkah yang lebih efektif dan terintegrasi. Meskipun memiliki

keterbatasan, pengembangan kluster tetap populer di kalangan pembuat kebijakan, Ketels (2013) menemukan:

- a. Kluster yang terbentuk secara alami dan diidentifikasi secara positif dengan berbagai hasil yang diinginkan, termasuk upah rata-rata yang lebih tinggi, pertumbuhan lapangan kerja yang meningkat, tingkat permulaan bisnis baru yang lebih tinggi, dan pertumbuhan yang tetap;
- b. Dampak positif pada penciptaan lapangan kerja di industri terjadi karena adanya potensi pertumbuhan dan perkembangan yang lebih lanjut;
- c. Kebijakan kluster dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing kluster.

C. Inovasi dan Akademik: Menghubungkan Penelitian dalam Bisnis

Selain adanya peran dari pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal atau masyarakat, universitas juga memiliki peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan. Cabalu dkk. (2000) mengakui universitas memiliki tiga dampak besar di wilayah yang meliputi:

- a. Pendapatan dan lapangan kerja yang dihasilkan secara lokal melalui penelitian dan pengajaran;
- b. Sumber daya manusia yang berkualitas karena berpendidikan tinggi ;
- c. Adanya kegiatan penelitian dan pengembangan dapat menciptakan peningkatan pendapatan pada perusahaan publik dan.

Ketiga dampak ini Cabalu et al. (2000) menganggap pembentukan keterampilan, sebagai aspek yang paling signifikan. Lembaga penelitian atau akademisi dipandang penting karena merupakan sumber inovasi berdasarkan dari penelitian atau dikembangkan bersama dengan industri. Pendidikan merupakan sumber keterampilan yang penting bagi tenaga kerja karena menjadi penambah modal manusia. Demikian juga akademisi menjadi unsur penting dalam teknologi regional dan strategi inovasi. Untuk dapat memenuhi kebutuhan seperti perubahan teknologi dan penyusunan alur bisnis lokal yang terstruktur memerlukan peran akademisi. Dengan melibatkan peran akademisi dalam bisnis maka akan melahirkan inovasi teknologi di kalangan bisnis lokal,

D. Spesialisasi cerdas (*Smart Specialization*)

OECD (2013) mencatat bahwa spesialisasi cerdas memiliki perbedaan dari kebijakan industri dan inovasi tradisional, terutama dalam proses yang mendefinisikan sebagai penemuan kewirausahaan menjadi proses interaktif dimana kekuatan pasar dan sektor swasta menemukan maupun menghasilkan informasi tentang kegiatan baru, dimana pemerintah memberdayakan para aktor yang paling mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu, strategi spesialisasi cerdas bersifat *bottom-up* daripada kebijakan industri tradisional, karena memiliki fokus pada mengaktifkan aset berbasis pengetahuan.

Strategi ini mendorong diversifikasi strategis dengan lokalitas untuk memikirkan cara di mana teknologi dapat membantu memperluas basis ekonomi. Dalam pengertian ini, kebijakan dimaksudkan untuk membantu pengusaha mengeksplorasi kemungkinan yang muncul dari inovasi, daripada mendukung proyek atau investasi individu. Spesialisasi cerdas berfokus pada peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi penggunaan teknologi. Menurut OCED (2013) dalam strategi spesialisasi cerdas, mencatat bahwa teknologi yang akan dieksplorasi untuk komersialisasi lebih lanjut harus sesuai dengan keunggulan komparatif aktual dan potens dari setiap wilayah. Spesialisasi cerdas telah menjadi strategi utama untuk pengembangan daerah dan kota. Spesialisasi cerdas menghubungkan strategi penelitian dan inovasi nasional dengan tujuan untuk menjadi ekonomi yang cerdas, berkelanjutan, dan inklusif. Strategi spesialisasi cerdas menunjukkan fokus pada inovasi dan pembentukan perusahaan baru, mencapai skala ekonomi dalam pembangunan ekonomi, menarik investasi asing, dan bekerja lebih banyak. secara efektif dengan pemangku kepentingan. Dalam banyak hal, spesialisasi cerdas dipandang sebagai pelengkap, atau cerminan dari strategi pembangunan ekonomi yang sudah mapan. Spesialisasi cerdas dapat dilakukan melalui strategi yang meliputi:

- a. Memfokuskan investasi pada skala lokal;
- b. Meningkatkan proses inovasi;
- c. Meningkatkan tata kelola yang meliputi proses sektor publik untuk memasukkan pemangku kepentingan;

- d. Menggunakan strategi berbasis tempat untuk mengubah ekonomi lokal dan regional;
- e. Membuat daerah lebih terlihat oleh investor internasional;
- f. Meningkatkan koneksi internasional dan eksternal;
- g. Memperlancar proses perencanaan pembangunan;
- h. Mengumpulkan sejumlah besar sumber daya dalam inovasi;
- i. Mempromosikan limpahan pengetahuan dan diversifikasi teknologi.

Dapat dipahami bahwa, strategi spesialisasi cerdas dapat dianggap sebagai cara untuk mendorong inovasi teknologi yang berkelanjutan di daerah, kota, dan bisnis lokal. Strategi ini mengakui bahwa banyak teknologi dapat dialihkan dari satu industri ke industri berikutnya, dan mekanisme diperlukan untuk memajukan inovasi dan mendorong bisnis di berbagai industri untuk menguji nilainya. Profil daerah hanya memastikan bahwa sumber daya yang terbatas terkonsentrasi di daerah yang paling mungkin untuk menghasilkan hasil yang positif, dan peran lembaga sektor publik pada skala nasional, negara bagian atau kota untuk memfasilitasi proses ini.

I.5.2 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif dengan basis ekonomi kerakyatan yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Menurut World Bank⁵⁵, UMKM mewakili sekitar 90% bisnis dan lebih dari 50% lapangan kerja diseluruh dunia. Hal ini membuktikan bahwa UMKM memiliki potensi yang besar untuk terus memulihkan perekonomian di Indonesia⁵⁶.

UMKM memiliki definisi dan cara pandang yang berbeda-beda disetiap negara. Dalam buku Dr. Mukti Fajar menyatakan bahwasanya di luar Indonesia UMKM memiliki sebutan sebagai *Small Medium Enterprises (SMEs)*. Pengertian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu:

⁵⁵ Worldbank. (2021). Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance. *Worldbank.org*.
<https://www.worldbank.org/en/topic/sme/finance>.

⁵⁶ Supeno, E. (2016). Kosep Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Daerah. *Jejaring Administrasi Publik*: Vol. 8, (2).

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar.

Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja yang dibedakan menjadi 4 klasifikasi yaitu, Usaha Mikro merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang. Usaha Kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Serta Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Industri rumah tangga merupakan industri yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang. Dengan adanya pemaparan definisi UMKM diatas maka dapat dipahami bahwa UMKM merupakan suatu usaha dengan modal awal kecil atau aset (nilai kekayaan) yang kecil dan jumlah tenaga kerja yang terbatas⁵⁷.

UMKM menjadi faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi karena UMKM merupakan sektor ekonomi yang mencakup banyak bidang dan sistem kerja yang langsung berhadapan dengan sektor riil, sehingga masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan adanya pengurangan angka pengangguran⁵⁸. Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan adanya upaya

⁵⁷ Sudiyarti, N., dkk. (2017). Pengaruh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*: Vol.14 (2).

⁵⁸ Ibid.

pengembangan secara terstruktur pada sektor UMKM. Salah satunya dengan melakukan pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas merupakan proses peningkatan berleknjutan dari individu, organisasi, atau lembaga yang berlangsung lebih dari satu kali. Hal ini menjadi penting dalam menetapkan kondisi, kualitas, maupun potensi baik individu, institusi, dalam memenuhi tujuan yang akan dicapai. Demikian juga dengan pandangan Moeljarto (2001) dalam penelitian Moh Said (2015) berasumsi bahwa pengembangan kapasitas menjadi suatu upaya untuk mengatur kondisi dan kualitas sumber daya manusia, dan komitmen baru⁵⁹. Menurut Milen (2004:17) pengembangan kapasitas menjadi suatu konsep yang luas mencakup peningkatan sumber daya manusia dan isu-isu terkait, serta kecenderungan dalam bidang manajemen seperti manajemen pengetahuan, maupun informasi. Grindle dan Hilderband (1995) mendefinisikan kapasitas menjadi kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang tepat secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Pada dasarnya pengembangan kapasitas mengacu pada perbaikan kemampuan organisasi sektor publik, baik secara sendiri maupun bekerja sama dengan organisasi lain dalam menjalankan tugas. *United National Development Program* (UNDP) (2009) juga memiliki asumsi bahwa pengembangan kapasitas merupakan suatu proses transformasi melalui individu, organisasi, dan masyarakat dalam memperkuat dan mempertahankan kemampuannya guna mencapai tujuan pembangunan mereka dari waktu ke waktu⁶⁰. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (2009) mendefinisikan pengembangan kapasitas menjadi suatu proses individu, kelompok, dan organisasi, institusi maupun negara mengembangkan, meningkatkan dan mengatur sistem sumber daya dan pengetahuan mereka yang tercermin dari kemampuan secara individu dan kolektif, guna memecahkan masalah dan mencapai tujuan⁶¹. Dengan adanya pemaparan diatas dapat dipahami bahwasanya pengembangan kapasitas menjadi sarana dalam meningkatkan kinerja

⁵⁹ Moh Said, 'Capacity Development of Human Resource in Local Government To Improve Public Service Quality', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 1.1 (2015), 8–13.

⁶⁰ UNDP. (2009). *Capacity Development : A UNDP Primer*. New York: United Nations Development Programme.

⁶¹ UNDP. (2009). *Frequently Asked Questions : The UNDP Approach to Supporting Capacity Development*. New York: United Nations Development Programme.

seseorang dan mengembangkan keahlian maupun keterampilan yang dibutuhkan oleh pemerintah, masyarakat, dan individu guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya tanggap kinerja.

Tujuan utama dari pengembangan kapasitas tidak hanya fokus terhadap sejauh mana peningkatan dari kualitas telah dicapai, tetapi juga meliputi dapat melakukan perubahan yang positif dan terus berkembang dengan keterampilan yang fungsional, serta keterampilan manajemen yang penting dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi inisiatif untuk pertumbuhan. Daniel Rickett merumuskan tujuan pengembangan kapasitas yaitu: (1) Mengakselerasikan pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku; (2) Melakukan pemantauan secara personal pada tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme, dan juga tanggung jawab dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas; (3) Mobilisasi sumber-sumber dana pemerintah dan lainnya; (3) Penggunaan sumber dana secara efektif dan efisien⁶². Sedangkan Farhad Analoui (2017) juga memiliki tujuan pengembangan kapasitas yang meliputi⁶³:

1. Meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan sumber daya untuk pemanfaatan yang efektif.
2. Menyatukan kemampuan yang berbeda untuk pemahaman yang lebih baik, serta mempererat kerjasama.
3. Membawa perubahan dalam isu-isu seperti nilai-nilai, sikap, motivasi, dan kondisi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan

1.5.2.1 Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang penting dalam perekonomian. Pengembangan pada UMKM bertujuan untuk menciptakan, memperbaiki, serta meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Untuk dapat melaksanakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkelanjutan, diperlukan upaya penyusunan strategi

⁶² Bilpatia, L. O. (2017). Dimensi Capacity Building Perempuan Dalam Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

⁶³ Analoui, F. (2017). *Critical Capacity Development*. United Kingdom: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-47416-8>. Hal. 58

yang terstruktur. Adapun pengembangan UMKM menurut Budiarto, dkk (2021) meliputi empat aspek, yaitu⁶⁴:

1. Aspek Pasar

A. Jaringan Usaha dan Jaringan Pemasaran

Konsep jaringan usaha dibedakan menjadi dua yaitu *satellite factors system* ialah merupakan industri besar yang hanya memproduksi bagian-bagian penting dan merakit dari produk yang dihasilkan, sedangkan konsep *cooperative exchange program* merupakan forum kerja sama informasi dan pengalaman dalam pengembangan usaha. Untuk menciptakan pengembangan jaringan usaha dapat dilakukan dengan beberapa strategi yang meliputi:

a. Jaringan Subkontrak

Jaringan subkontrak merupakan sebuah kerjasama di mana kontrak bisnis satu pihak sebagian maupun seluruh bagiannya dikontrakkan ke pihak lain. Subkontrak dapat menguntungkan industri kecil atau besar dan juga subkontraktor, karena subkontrak dapat memberikan peluang untuk mempertahankan keberlangsungan usaha produksi, membuka peluang untuk mendukung munculnya usahawan baru, dan peluang untuk memajukan usaha.

b. Pendekatan Kluster

Kluster industri merupakan pengelompokan sektor yang sama dari berbagai perusahaan di sebuah wilayah tertentu. Sunartiningsih, 2009 membedakan kluster menjadi empat tipe, yaitu: (1) Kluster yang tidak aktif, dengan ciri-ciri sektor informal, perkembangan statis, produsen memproduksi barang yang serupa dengan teknologi dan tempat penjualan yang sama; (2) Kluster aktif, dengan ciri-ciri memiliki perkembangan teknologi tetapi masih ditunjukkan melalui kualitas relasi; (3) Kluster dinamis, dimana kluster ini dikembangkan dengan jaringan perdagangan keluar; (4) Kluster modern dan maju, yang memiliki ciri-ciri perusahaan utama telah menggunakan teknologi dalam produksi dan memiliki jaringan multinasional. Dalam menciptakan kluster yang terpadu diperlukan komoditas yang terpilih, memiliki keunggulan untuk dapat bersaing, memiliki

⁶⁴ Budiarto, R. (2021). Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal 100-123

kesadaran dan keinginan yang cukup tinggi, memiliki aglomerasi, dan adanya sarana prasarana yang mendukung.

Dengan terciptanya kluster dalam suatu daerah dengan industri yang sama diharapkan dapat menciptakan sentra UMKM yang memiliki spesialisasi produk dan keunggulan, serta berdaya saing. Terciptanya sentra produksi UMKM dapat merangsang produktivitas yang berkelanjutan serta keberhasilan dalam usahanya karena adanya suplai bahan baku dan pemasaran produk.

c. Waralaba

Waralaba adalah sistem keterkaitan usaha vertikal antara pemilik paten yang menciptakan paket teknologi bisnis *franchisor* dengan penerima hal pengelolaan operasional bisnis *franchise*. Menurut Sunartiningasih (2009) dalam Budiarto (2021) sistem waralaba memiliki lima keuntungan bagi UMKM utamanya, yaitu⁶⁵: (1) UMKM mendapat pelatihan khusus dari *franchisor*, serta memanfaatkan pengalaman dari *franchisor* dalam menjalankan bisnis; (2) UMKM akan mengeluarkan biaya yang lebih rendah; (3) UMKM mendapatkan keuntungan melalui produk yang dihasilkan karena telah memiliki citra merek (*brand image*) yang berkualitas di konsumen; (4) UMKM dapat memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan *franchisor*; (5) UMKM mendapatkan bantuan dalam memilih lokasi dari *franchisor*.

d. Pengembangan Jaringan Pemasaran

Dalam melakukan upaya pengembangan jaringan pemasaran dapat dilakukan melalui memiliki kontak dengan berbagai pusat informasi bisnis, asosiasi perdagangan di daerah, nasional, maupun di luar negeri, sosialisasi dan pengenalan *e-commerce* bagi UMKM, pendirian dan pembentukan pusat data bisnis UMKM.

2. Aspek Teknologi dan Inovasi

A. Teknologi Tepat Guna bagi UMKM

Teknologi memiliki peran sentral bagi perekonomian negara dalam meningkatkan pertumbuhan perdagangan, produktivitas industri, serta daya saing internasional. Selain perekonomian negara, teknologi juga memiliki pengaruh

⁶⁵ Ibid.

yang besar terhadap kesuksesan bisnis UMKM. Diperlukan pengembangan teknologi tepat guna bagi UMKM untuk memudahkan UMKM mengadopsi teknologi. Dalam menekankan difusi teknologi diperlukan adanya proses mengintegrasikan teknologi, keterampilan, dan budaya dimana teknologi akan dioperasikan. Pada praktik dan teori difusi teknologi harus dapat mengimbangi yang disesuaikan dengan pengetahuan dan kemampuan lokal. Pengembangan teknologi bagi UMKM secara konkret dapat dilakukan dengan strategi:

1. Upaya perkuatan teknologi untuk UMKM dapat dilakukan melalui sosialisasi terkait manfaat teknologi baru yang dihasilkan oleh para pemangku kepentingan, terutama ditujukan bagi UMKM binaan.
2. Membentuk *pilot project* yaitu demonstrasi kesuksesan secara nyata dari pemanfaatan teknologi guna mampu meyakinkan UMKM untuk menerapkan teknologi pada usahanya.
3. Pemberian modal awal untuk mengimplementasikan teknologi baru pada UMKM. Teknologi memiliki manfaat yang besar bagi UMKM, sehingga dapat menguntungkan UMKM secara teknis, sosial, dan ekonomi.
4. Melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi yang dapat disesuaikan pada aspek sosial ekonomi setempat, guna menerapkan teknologi secara layak.
5. Memotivasi berbagai lembaga penelitian teknologi untuk meningkatkan perhatiannya pada teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM, pengembangan pusat inovasi desain sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan pusat penyuluhan dan difusi teknologi yang tersebar luas ke berbagai wilayah UMKM, dan peningkatan kerja sama antar asosiasi-asosiasi UMKM dan perguruan tinggi untuk pengembangan teknologi UMKM.

B. Inovasi untuk UMKM

UMKM harus mampu secara fleksibel memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Hal ini secara tidak langsung menuntut UMKM untuk dapat terus berinovasi dan melakukan pemasaran yang efektif. Salah satu yang dapat dilakukan oleh UMKM dengan memanfaatkan teknologi dan melakukan inovasi, akan menjadi pencapaian unggul bagi UMKM. Inovasi dapat mendorong adanya peningkatan produktivitas dan daya kompetisi, serta meningkatkan prinsip-prinsip

pembangunan yang berkelanjutan. Untuk dapat mendorong inovasi bagi UMKM diperlukan adanya langkah implementasi dan pengembangan budaya inovasi meliputi:

1. Memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap perbaikan-perbaikan kecil maupun terobosan besar yang inovatif pada produk, jasa atau proses pada UMKM.
2. Memberikan dorongan melalui mekanisme atau suasana manajemen kepemimpinan guna mendorong adanya perbaikan dalam produk, jasa, dan proses maupun kombinasi di antara tiga komponen tersebut.
3. Memberikan kesempatan luas bagi seluruh bagian untuk membina *network* internal dan eksternal melalui berbagai program seperti rotasi tugas, kunjungan ke perusahaan, dll.
4. Melakukan perbandingan dengan pesaing (*benchmarking*) guna meningkatkan kemampuan bersaing sekaligus mendorong tumbuhnya inovasi baru.
5. Peningkatan wawasan persaingan global untuk meningkatkan kemampuan merespons ancaman dan peluang.

3. Aspek Permodalan

Salah satu penunjang bertahannya UMKM adalah ketersediaan modal yang memadai melalui sistem kredit. Kredit merupakan suntikan modal yang bersifat sementara tetapi dapat menunjang kebutuhan modal bagi UMKM guna meningkatkan nilai tambah dan mampu meningkatkan surplus setelah dikurangi biaya jangka pendek. Untuk menciptakan sistem kredit yang ideal diperlukan adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara debitor dan kreditor melalui pembentukan lembaga yang dapat dilakukan dengan:

- a. Adanya pendekatan baru dalam menanggulangi kemiskinan melalui penambahan dan pemberdayaan *microfinancing* yang berfokus pada usaha mikro dengan penguatan dan pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memiliki akses langsung terhadap usaha mikro.
- b. Meningkatkan kapasitas pelayanan LKM pada sektor mikro dengan adanya *legal framework* atas keberadaan LKM sehingga aktivitas LKM akan lebih

optimal dalam mendukung pemberdayaan usaha mikro maupun pengembangan jaringannya.

Pembentukan lembaga layanan kredit memiliki peran yang penting dan diperlukan untuk kemudahan mendapatkan kredit. Selain adanya pembentukan lembaga, diperlukan juga adanya peningkatan akses UMKM melalui beberapa program, yang meliputi:

- a. Pengembangan skema kredit investasi dan kredit modal awal bagi UMKM.
- b. Peningkatan efektivitas fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Meningkatnya jumlah dan kualitas KKMB diharapkan akan semakin UMKM yang dibina dan mempermudah akses pada sumber pembiayaan di bank.
- c. Penguatan sistem penjaminan kredit bagi UMKM dengan melakukan beberapa upaya seperti mempercepat program penerbitan sertifikat tanah bagi UMKM, meningkatkan peran lembaga penjaminan kredit bagi UMKM, dan mengembangkan sistem resi gudang sebagai instrumen pembiayaan bagi UMKM.
- d. Optimalisasi pemanfaatan dan nonperbankan bagi pengembangan UMKM. Dana nonperbankan dapat diakses oleh UMKM selain dari dana bergulir APBN dan APBD, juga dapat berasal dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada BUMN, dana-dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan dari perusahaan-perusahaan swasta, dana kebajikan atau sosial, dan sebagainya. Dana-dana tersebut dapat dikelola dengan lebih terpadu, profesional, dan transparan agar berdaya guna dalam pengembangan UMKM.

Pada aspek permodalan juga mengintegrasikan teknologi dan kemampuan inovasi dalam menjalankan bisnis UMKM. Akses permodalan untuk UMKM tidak hanya memfasilitasi belanja barang, tetapi juga melakukan investasi peningkatan kapasitas teknologi yang idealnya memiliki manfaat seperti meningkatkan nilai tambah barang atau jasa yang menjadi bisnis UMKM, mampu meningkatkan efisiensi, sesuai dengan kemampuan UMKM dalam operasional maupun pemeliharaan teknologi tersebut, dan juga minimnya risiko keuangan karena telah terkendali. Diperlukan adanya integrasi layanan keuangan seperti

pinjaman berbagai skema dengan layanan non finansial seperti konsultasi, pelatihan, pendampingan dan teknologi maupun inovasi. Integrasi layanan menuntut adanya peran dari berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan UMKM, untuk dapat mengarahkan serta mensinergikan peran, tugas, dan kemampuan dari berbagai peran pemangku kepentingan guna menciptakan layanan yang terpadu pada aspek finansial maupun non finansial untuk UMKM.

4. Aspek Manajemen

Kemampuan dalam memberikan respon yang cepat dan tanggap untuk menghadapi setiap tantangan maupun isu yang dihadapi menjadikan suatu kunci untuk dapat bersaing bagi UMKM. UMKM yang unggul ialah UMKM yang mampu mengatasi kompleksitas usaha yang semakin meningkat, melalui praktik manajemen yang disesuaikan dengan perubahan kondisi usaha yang berubah setiap saat. Selain peran dari pemerintah, kontribusi tertinggi dalam proses pengembangan usaha adalah manajemen melalui sisi internal UMKM.

Dalam membangun sebuah UMKM yang akan semakin berkembang diperlukan adanya gaya kepemimpinan yang diselaraskan, serta mampu membawa UMKM untuk dapat melakukan inovasi terbaru. Manajemen menjadi aspek terpenting dalam pengembangan, penciptaan, dan pengelolaan UMKM. Manajemen transformatif menjadi pendekatan yang paling tepat untuk dapat mendobrak pola pikir tradisional yang memandang hubungan antara pemimpin dan karyawan hanya dilandaskan atas dasar *reward* dan *punishment* yang diberikan. Dengan menerapkan pola kepemimpinan transformatif akan memberikan wewenang kepada karyawan dalam melakukan pekerjaannya, serta adanya penerapan ini akan menciptakan tujuan yang selaras dengan perusahaan. Kalloway dan Barling (2001) dalam Budiarto, dkk (2021) memiliki empat pendekatan kepemimpinan transformatif yang diimplementasikan pada UMKM, meliputi: (1) Menciptakan kepercayaan dan dorongan rasa hormat melalui pengambilan keputusan secara transparansi dan konsisten; (2) Mendorong sikap antusias dan optimis guna memotivasi karyawan untuk dapat bekerja dengan efektif dan efisien; (3) Melibatkan peran karyawan dalam pengentasan masalah

dalam perusahaan baik internal maupun eksternal, untuk menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan; (4) Memberikan pengakuan (*reward*) kepada karyawan.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak perubahan yang sangat besar, salah satunya adanya perubahan pada strategi klaster unggulan pada tahun 2020-2024. Dalam merespon upaya pembaharuan strategi pengembangan UMKM pasca pandemi, Pemerintah melakukan beberapa tahapan yang meliputi: (1) Fokus komoditas unggulan dibagi menjadi dua kategori yaitu *Potential Winners* dan *Potential Losers*. (2) Merancang fokus strategi dan pendekatan *survival* yang disesuaikan dengan kondisi pada UMKM melalui Tabel I.5.

Tabel I.5. Fokus Pendekatan Klaster Unggulan Pasca Pandemi Covid-19

No.	Fokus Pendekatan	Fokus Strategi
1.	Mengenali pasar atau konsumen di era <i>New Normal</i> .	Mengenali perilaku manusia yang baru, dan berbeda dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.
2.	Mengenali pentingnya kapasitas melalui diferensiasi produk atau jasa.	Mengenali peluang dimasa krisis dengan belajar dan menata ulang strategi baru yang disesuaikan pada saat pandemi Covid-19, dan belajar untuk menemukan inovasi bisnis.
3.	Mengkomunikasikan keunggulan, keunikan, dan kekhasan produk maupun jasa.	Mengelola disrupsi pemasaran dengan cara baru untuk menciptakan dan menghasilkan produk maupun layanan yang unggul.
4.	Menggunakan <i>platform digital</i> .	Menemukan cara dan metode baru dengan <i>platform digital</i> .

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2020, diolah penulis.

Selain adanya rancangan strategi pasca pandemi Covid-19 yang dibuat oleh Pemerintah, penelitian Pratama (2021) juga mengemukakan strategi pengembangan UMKM pasca pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk dapat menanggulangi permasalahan pada UMKM terutama di masa krisis. strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada *new normal* dibagi menjadi enam yang meliputi⁶⁶:

⁶⁶ Pratama, V., et al. (2021). Development Strategy of SMEs in The New Normal Era of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Literature Review. Malang: *IOP Conf*.

1. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan suatu upaya untuk mengatur, mengorganisir, mengkoordinasi, dan mengendalikan hal yang berhubungan dengan uang. Pandemi Covid-19 memaksa UMKM untuk dapat menyesuaikan situasi terutama pada anggaran usaha. Dimasa krisis UMKM harus melakukan beberapa langkah untuk dapat mempertahankan usahanya seperti menunda investasi, memanfaatkan bantuan sosial yang didanai oleh pemerintah, menyelesaikan kontrak kerja yang biayanya dibayar perjam melalui perwakilan, mengurangi biaya, mengatur kontrak dan persyaratan, mengurangi biaya tenaga kerja, mengurangi uang muka, dan dapat meningkatkan kinerja maupun inovasi yang bertujuan untuk mendapatkan pemasukan.

2. Distribusi Rantai Pasokan

Menciptakan model pilihan untuk rencana rantai pasokan menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh UMKM. UMKM memerlukan rencana rantai pasok yang tidak terbatas pada pusat biaya tetapi tetap memperhitungkan waktu reaksi dan mempertimbangan kemampuan beradaptasi. Dengan demikian pengawas rantai pasokan dapat mengawasi kelompok rantai pasokan pada kondisi darurat. Dalam melakukan pemulihan diperlukan penilaian ulang pada struktur rantai pasok dalam hal area, kapasitas pembangkitan dan administrasi aliran bahan, serta data di antara individu rantai suplai saat ini guna membedakan *pro* dan kontra dan juga membenahan kembali struktur rantai suplai.

3. Transformasi Digital

Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat berdampak pada perubahan pola kehidupan di masyarakat dan juga mendorong adanya perubahan pada pemenuhan kebutuhan UMKM. Pandemi Covid-19 mendorong UMKM untuk mencari dan mengenali cara-cara pemasaran maupun penjualan secara tanpa kontak fisik atau online. UMKM dapat memanfaatkan perkembangan digital dengan bentuk virtual dari pendaftaran, perencanaan, dan sosialisasi, peningkatan eksponensial dalam komunikasi berbasis internet, iklan secara virtual, dan

pemanfaatan social media. Perubahan pola berbelanja masyarakat menjadi peningkatan yang kritis dengan kemajuan yang fleksibel bagi UMKM, tetapi perubahan ini juga disertai dengan pelatihan pada pekerja yang harus memahami komunikasi berbasis web.

4. Hubungan Jaringan

Hubungan kerjasama memiliki peran yang penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan industri di Indonesia. Dalam membangun kerjasama dalam pembangunan industri Indonesia masih melakukan kerjasama dalam jangka pendek. Hal ini harus ditinjau ulang terkait tujuan dari mitra bisnis, konsultasi jaringan bisnis, akumulasi modal melalui langkah-langkah internal yang di dukungan oleh pemerintah, politik, masalah implementasi dukungan maupun hambatan politik, adaptasi model bisnis, dan restrukturisasi internal. Dengan melakukan pendekatan kolaboratif pada seluruh mitra perusahaan, klien, sistem, *cargo forwarders*, pusat pertukaran, pesaing, dan afiliasi pertukaran UMKM akan dapat mempertahankan usahanya, serta akan mendapatkan relasi yang lebih luas.

5. Kebijakan Pemerintah

UMKM tidak lepas dari dukungan Pemerintah. Pemerintah menjadi fasilitator bagi UMKM, salah satunya dengan menggunakan aset keuangan untuk memasok dukungan dalam mempengaruhi bisnis, mengatur keamanan kapasitas yang bermanfaat karena akan dimanfaatkan untuk memulihkan ekonomi nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui keamanan perwakilan dan ketepatan data, peningkatan ekonomi, gaji dan dukungan bisnis untuk UMKM, penataan, membangun kemampuan kekuatan dan hubungan sosial yang positif. Pemerintah harus meningkatkan skala, memperluas cakupan, serta membangun kualitas jaminan bisnis guna menjamin UMKM dengan jaminan bisnis.

6. Orientasi dan Informasi

Peran eksplorasi maupun eksploitasi memiliki peran penting, terutama pada saat UMKM menghadapi keadaan yang darurat seperti keuangan dengan tingkat yang berbeda-beda. Keadaan pasar yang tidak pasti, mendorong adanya upaya penyelidikan yang menghasilkan informasi serta kompetensi modern untuk dapat menyesuaikan dengan keadaan pasar. Selain itu, kombinasi antar

pengenalan kewirausahaan (*entrepreneurial introduction*) dan orientasi pasar (*market orientation*) menjadi solusi dalam membuat perbedaan di tengah masa pandemi. Kepribadian dan keterampilan seperti optimisme pengusaha, keterampilan negosiasi, tepat kendali, orientasi pasar, orientasi kewirausahaan, kinerja, kebutuhan untuk berprestasi, dan pengambilan risiko memiliki efek positif terhadap kinerja UMKM. Adanya penyeimbang dan penyegaran ekonomi kembali sangat diperlukan dalam perencanaan untuk menghadapi kondisi pandemi darurat.

I.5.2.2 Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menciptakan pengembangan UMKM yang berkelanjutan, selain membutuhkan adanya strategi yang terstruktur, adanya peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan menjadi salah hal penting dalam pengembangan UMKM. Pemangku kepentingan menurut Freeman (1984) dalam penelitian Jones (2019) pemangku kepentingan merupakan suatu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan⁶⁷. Varvansovszky (2000) juga mendefinisikan pemangku kepentingan menjadi suatu metode pendekatan yang menghasilkan pengetahuan terkait aktor, individu, dan organisasi, sehingga dalam mengambil keputusan yang akan diimplementasikan akan dapat memahami perilaku, niat, koneksi, serta minat aktor dalam menilai pengaruh sumber daya yang dimiliki⁶⁸. Sedangkan Preston, dan Sachs dalam Lizano (2019) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai salah satu penentu dalam kapasitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan dari waktu ke waktu karena memiliki nilai jangka panjang⁶⁹.

⁶⁷ Jones, O. W., et al. (2019). SME Productivity Stakeholders: Getting in The Right Orbit', *International Journal of Productivity and Performance Management*. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-06-2019-0274>.

⁶⁸ Analia, D. (2020). The Impact of Stakeholders to the Performance of Small and Medium Enterprises in Padang City , West Sumatera. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Agroindustri*. 9(3).

⁶⁹ Lizano, M. M. (2019). Stakeholders and Long-Term Sustainability of SMEs . Who Really Matters in Crisis Contexts , and When. *Journal of Sustainability*, 11. <https://doi.org/10.3390/su11236551>.

Pemangku kepentingan memiliki peran yang berbeda-beda, Darnall dan Henriques (2010) membagi menjadi dua kualifikasi pemangku kepentingan yang meliputi⁷⁰:

1. Pemangku Kepentingan Primer

Pemangku kepentingan primer dapat disebut juga sebagai *stakeholder* utama, dimana peranan pemangku kepentingan utama menerima dampak positif maupun negatif secara langsung dari suatu kegiatan. Pemangku kepentingan ini menjadi salah satu aktor yang terlibat langsung dalam transaksi ekonomi dan masih dipengaruhi secara fokus dengan organisasi. Pemangku kepentingan utama dibedakan menjadi dua yaitu: (1) pemangku kepentingan yang berada diluar organisasi (eksternal) yaitu pemangku kepentingan yang memiliki hubungan dengan rantai nilai seperti pembeli komersial, dan pemasok; (2) pemangku kepentingan yang berada dari dalam organisasi (internal) yaitu pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam mendukung tujuan lingkungan perusahaan serta mengatur organisasi seperti manajemen perusahaan dan karyawan non-manajemen.

2. Pemangku Kepentingan Sekunder

Pemangku kepentingan sekunder dapat disebut juga sebagai *stakeholder* penunjang, dimana memiliki peran sebagai perantara dalam menunjang proses penyampaian dari suatu kegiatan. Pemangku kepentingan sekunder menjadi aktor yang tidak terlibat secara langsung dalam transaksi ekonomi tetapi masih mempengaruhi maupun dipengaruhi secara fokus dengan organisasi. Pemangku kepentingan sekunder menjadi aktor yang memiliki peran sebagai pemilik modal, pelaksana, pengawas, serta organisasi advokasi. Pemangku kepentingan sekunder dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Pemangku kepentingan masyarakat memiliki kapasitas untuk memobilisasi opini publik dalam mendukung maupun menentang perusahaan. Kelompok ini terdiri dari kelompok lingkungan, organisasi masyarakat, serikat pekerja, asosiasi industri; (2) Pemangku kepentingan regulasi merupakan pihak berwenang dalam pemerintahan yang memiliki kewenangan

⁷⁰ Darnall, N. et al. (2010). Adopting Proactive Environmental Strategy : The Influence of Stakeholders and Firm Size. *Journal of Management*, Vol. 47(6). <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2009.00873.x>.

membuat persyaratan maupun pemeriksaan kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan tersebut.

Pemangku kepentingan memiliki peran yang besar terhadap pengembangan UMKM, sehingga harus memahami serta menghargai konteks sosial, ekonomi dan lingkungan lokal di mana pembangunan berkelanjutan dapat difasilitasi. Berikut peran pemangku kepentingan menurut *Commonwealth Local Government Forum (CLGF)* 2019 yaitu Pemerintah Daerah yang meliputi⁷¹:

1. Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan lokal termasuk dalam perencanaan, koordinator, penggerak ekonomi lokal, serta menyediakan fasilitas maupun jalan untuk pengentasan kemiskinan maupun mencapai tujuan UMKM yang berkelanjutan. Sehingga penting untuk memastikan tidak adanya ketertinggalan pada UMKM.

2. Pemerintah Daerah sebagai Regulator

Pemerintah Daerah menjadi penting bagi UMKM karena memiliki kewenangan yang besar melalui perancangan otoritas yang dibuat. Kebijakan ini akan berdampak pada kemudahan UMKM melalui pengembangan sektor usahanya, serta dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan layak bagi UMKM lokal.

3. Pemerintah Daerah sebagai Katalisator

Selain bertanggung jawab terhadap pembangunan lokal, pemerintah daerah juga memiliki peran untuk mempercepat proses perkembangan UMKM, dimana pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk bisnis lokal. Pada prosesnya pemerintah daerah tidak terlibat secara keseluruhannya dalam mengatur, karena jika melibatkan pemerintah daerah secara keseluruhan dalam prosesnya maka menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien karena tidak bergerak secara mandiri.

⁷¹ CLGF, (2019). op. cit. Hal 10.

I.5.3 Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) Melalui *Local Economic Development* (LED)

Local Economic Development (LED) didefinisikan sebagai proses yang melibatkan peran pemangku kepentingan lokal dalam menyusun strategi secara terstruktur dan mengimplementasikannya dengan tujuan menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan sumber daya lokal guna mencapai kehidupan masyarakat yang berkualitas. Jika dikaitkan dengan pengembangan UMKM, *Local Economic Development* menjadi salah satu upaya pengembangan UMKM untuk dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian lokal maupun intelektual dan kapabilitas SDM-nya guna melakukan pendobrakan inovasi serta upaya mempertahankan usahanya terutama di masa pandemi COVID-19.

Dalam penerapan LED diperlukan adanya partisipasi dari peran pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengidentifikasi tantangan pembangunan, merumuskan adanya strategi untuk mengatasi rintangan maupun isu yang dapat menghambat penerapan LED, serta memfasilitasi kepemilikan proses pembangunan. Hal ini serupa dengan definisi LED menurut *Commonwelath Local Government Forum* (CLGF) yang menyebutkan bahwa LED sebagai pendekatan partisipatif dalam pembangunan, dimana aktor lokal, pemerintah daerah, LSM, masyarakat, dan bisnis kemitraan bekerjasama secara kolektif untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengangguran maupun kemiskinan dengan memanfaatkan sumber daya dan keterampilan lokal. Dengan adanya kerjasama dan interaksi antar pemangku kepentingan lokal akan menumbuhkan ekonomi suatu wilayah dengan melakukan identifikasi hambatan pertumbuhan ekonomi, perumusan, dan implementasi langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dengan memanfaatkan peluang ekonomi dan bisnis. Dalam LED masing-masing pemangku kepentingan memiliki perannya sendiri untuk dapat menerapkan LED guna melakukan pengembangan UMKM, menurut *Commonwelath Local Government Forum* (CLGF) pemangku kepentingan memiliki perannya yang meliputi:

1. Peran Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memiliki wewenang dalam pengembangan UMKM yang dapat dilakukan dengan menyediakan kerangka kerja konstitusi, kebijakan legislatif dan peraturan terkait pengembangan UMKM, mengkoordinasikan pemangku kepentingan LED nasional termasuk Kementerian yang memiliki keterkaitan dengan sektor UMKM, menyediakan sumber daya teknis, pengetahuan, dan alat bagi otoritas lokal untuk menerapkan LED, melakukan pemantauan terhadap implementasi LED maupun dampak dari adanya implementasi LED.

2. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam penerapan LED. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki peran untuk dapat memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam LED, mengidentifikasi dan memasarkan peluang ekonomi baru, menciptakan adanya lingkungan yang mendukung bisnis lokal, dan memastikan bahwa penerapan LED tidak hanya menjadi tanggung jawab pada sektor UMKM saja tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh otoritas lokal.

3. Sektor Swasta

Selain peran pemerintah dalam melakukan pengembangan UMKM melalui LED, peran swasta juga memiliki peran yang strategis bagi UMKM. Untuk dapat melakukan pengembangan UMKM sektor swasta dapat dilakukan melalui penyediaan barang dan jasa yang efisien dan efektif, melakukan investasi, menciptakan lapangan kerja, memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan guna menciptakan sumber daya lokal yang unggul, memberikan umpan balik yang membangun, membantu melakukan pemasaran, serta memiliki tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil juga menjadi salah satu pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan UMKM melalui LED. Hal ini dapat dilakukan dengan dapat memberikan informasi terkait wilayah lokal tersebut karena masyarakat sipil dianggap memiliki pengetahuan asli dan pemahaman yang melekat pada lokalitas, memiliki pemahaman yang berfokus pada isu lokalitas,

dapat melakukan penelitian dan produksi pengetahuan maupun pengembangan keterampilan, membayar tarif dan pajak, memberikan akses tanah, dan turut serta dalam pengambilan keputusan dalam kepemimpinan lokal.

Dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui LED, dalam penelitian ini akan menggunakan pembangunan *endogenous* dengan pendekatan *bottom-up* yang nantinya akan disesuaikan dengan keadaan ril UMKM Kampung Logam Desa Ngingas Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dapat dilakukan melalui strategi yang dirancang oleh Andrew Beer dan Terry L. Clower (2021) guna mendorong aktivitas bisnis lokal, yang meliputi:

1. Strategi Sisi Penawaran

Strategi ini menjadi langkah pertama dalam menerapkan LED. Strategi ini dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat lokal dengan menjadikan tempat bisnis yang lebih baik guna meningkatkan daya tarik lokal, serta meningkatkan daya tarik tersendiri bagi produsen untuk dapat mempengaruhi keputusan produsen dalam membangun kantor pusat perusahaan dengan lokasi yang dapat sesuai dengan ritel maupun pengelolaan jaringan distribusi. Strategi sisi pasokan dikelompokkan menjadi tiga yaitu perencanaan penggunaan lahan, penyediaan infrastruktur, dan akusisi dan pelatihan keterampilan

2. Strategi Sisi Permintaan

Strategi ini memiliki penekanan pada sisi permintaan dengan meningkatkan permintaan pada produksi lokal. Strategi ini memiliki peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan merek lokal, karena merek merupakan hal penting untuk memasarkan barang dan jasa yang telah dihasilkan oleh kota, wilayah, maupun masyarakat, serta menjadi daya tarik bagi investasi.

3. Strategi Kelembagaan

Strategi ini menjadi penting dalam penerapan LED karena pada dasarnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pelaku lokal, pemerintah daerah, LSM, masyarakat, dan mitra bisnis menjadi fondasi utama dalam implementasi LED karena pemangku kepentingan lokal, yang menggunakan sumber daya dan kapasitas lokal menjadi penggerak dalam konsep ini.

4. Strategi Pengembangan Perusahaan Baru

Fokus pada strategi ini ada pada pengembangan perusahaan baru yang akan menghasilkan pembentukan bisnis mendasar bagi perekonomian di banyak wilayah, maupun pusat pertumbuhan lokal. Dalam melakukan perencanaan dan melaksanakan tindakan pembangunan ekonomi yaitu dengan memastikan persentase lebih tinggi dari *startup* bertahan. Pengembangan perusahaan baru memiliki empat strategi yang dapat diterapkan yaitu saran manajemen dan layanan informasi, pendampingan dan *economic gardening*, klub bisnis, dan inkubasi bisnis.

5. Strategi Transformasional

Strategi transformasional berusaha untuk membentuk dinamika ekonomi lokal dengan penyatuan pasokan, permintaan, dan proses kelembagaan untuk mendorong pertumbuhan. Strategi ini memiliki keterkaitan dengan teknologi dan juga adanya cara baru dengan memanfaatkan pembangunan fisik perkotaan daerah untuk mencapai tujuan ekonomi yang dilakukan tanpa konsekuensi perencanaan maupun pengembangan suatu kota maupun daerah. Untuk dapat menerapkan strategi transformasional, diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi menciptakan taman teknologi atau taman bisnis, kluster, inovasi dan pembelajaran dengan menghubungkan penelitian dan bisnis, dan spesialisasi cerdas.

Pengembangan UMKM memiliki tujuan untuk menciptakan, memperbaiki, serta meningkatkan kemampuan kinerja SDM maupun sistem UMKM yang lebih efektif dan efisien. Dalam strategi pengembangan UMKM, Pratama (2021) memiliki strategi pengembangan UMKM yang meliputi:

1. Manajemen keuangan, dimana strategi ini berupaya untuk mengatur, mengorganisir, mengkoordinasi, serta mengendalikan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan UMKM.
2. Distribusi rantai pasokan menjadi strategi dengan peran penting untuk mempertahankan UMKM. Dengan melakukan model pilihan rencana rantai pasokan yang tidak terlalu terbatas pada pusat biaya tetapi juga memperhitungkan waktu reaksi dan kontemplasi kemampuan beradaptasi.

3. Transformasi digital merupakan salah satu strategi UMKM untuk dapat bertahan di masa pandemi. UMKM dapat memanfaatkan perkembangan digital dengan bentuk virtual dari pendaftaran, perencanaan, dan sosialisasi, peningkatan eksponensial dalam komunikasi berbasis internet, iklan secara virtual, dan pemanfaatan social media.
4. Hubungan jaringan merupakan hubungan kerjasama yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan industri di Indonesia. Strategi ini dapat dilakukan dengan meninjau ulang terkait tujuan dari mitra bisnis, konsultasi jaringan bisnis, dukungan pialang, akumulasi modal melalui langkah-langkah internal, akumulasi modal melalui dukungan pemerintahan, dukungan politik, masalah implementasi dukungan maupun hambatan politik, adaptasi model bisnis, dan restrukturisasi internal. Dengan adanya kerjasama ini UMKM dapat mempertahankan usahanya, serta mendapatkan banyak relasi yang lebih luas.
5. Kebijakan pemerintah. Pemerintah menjadi fasilitator bagi UMKM, salah satunya dengan menggunakan aset keuangan untuk memasok dukungan dalam mempengaruhi bisnis, mengatur keamanan kapasitas yang bermanfaat karena akan dimanfaatkan untuk memulihkan ekonomi nasional.
6. Orientasi dan informasi. Keadaan pasar yang tidak pasti, mendorong adanya upaya penyelidikan yang menghasilkan informasi serta kompetensi modern untuk dapat menyesuaikan dengan keadaan pasar. Diperlukan adanya keterampilan maupun kepribadian pengusaha seperti adanya optimis, keterampilan negosiasi, tepat kendali, orientasi pasar, orientasi kewirausahaan, kinerja, kebutuhan untuk berprestasi, dan pengambilan risiko memiliki efek positif terhadap kinerja UMKM.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini, *Local Economic Development* (LED) dalam Pengembangan UMKM dipahami sebagai proses mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM dengan memanfaatkan sumber daya lokal dalam meningkatkan keahlian maupun keterampilannya dan melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang turut membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya melalui jaminan dan

fasilitas UMKM yang diberikan guna mencapai kehidupan masyarakat lokal yang lebih baik.

I.6 Definisi Konsep

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka teori yang telah dipaparkan diatas, untuk mempermudah pemahaman penelitian ini, berikut merupakan definisi konsep hasil dari kesimpulan konsep di atas sebagai berikut.

1. *Local Economic Development (LED)*

Local Economic Development (LED) merupakan suatu proses yang memiliki tujuan untuk mendorong, memfasilitasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan tenaga lokal, dan menciptakan lapangan kerja

2. Pendekatan *Endogenous* Dalam Pengembangan LED

Pendekatan *Endogenous* atau endogen merupakan pendekatan pembangunan yang bersifat *bottom-up*, melalui proses partisipatif dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan untuk memanfaatkan sumber daya lokal termasuk manusia, kelembagaan dan fisik, untuk pembangunan lokal.

3. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengembangan UMKM merupakan proses dalam meningkatkan dan mengembangkan keahlian maupun keterampilan yang dibutuhkan oleh pemerintah, masyarakat, dan individu guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, daya tanggap kinerja, serta kemajuan dalam UMKM.

4. Strategi *New Normal* Dalam Pengembangan UMKM

Strategi *new normal* dalam pengembangan UMKM merupakan suatu upaya dalam mempertahankan kondisi UMKM pasca pandemi Covid-19 dengan melakukan perubahan pada fokus dan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi pasca pandemi Covid-19.

5. Pengembangan UMKM dalam perspektif *Local Economic Development*

Proses mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui strategi *endogenous* dalam pengembangan UMKM dengan memanfaatkan sumber daya lokal dalam meningkatkan keahlian maupun keterampilannya dan melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang turut membantu UMKM dalam mengembangkan

usahanya melalui jaminan dan fasilitas UMKM guna mencapai kehidupan masyarakat lokal yang lebih baik.

I.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara kerja yang digunakan untuk memahami objek dari ilmu yang bersangkutan sehingga dalam sebuah penelitian keberadaan metode menjadi mutlak dibutuhkan karena adanya fakta-fakta sosial yang harus ditelaah hingga ke dalam, diamati dalam suatu kerangka acuan yang spesifik, serta harus diukur dengan tepat dan diamati pada suatu fakta yang berkaitan dengan fakta lain yang relevan. Metode penelitian menurut Creswell (2018) merupakan rencana dan prosedur yang mencakup langkah-langkah dari asumsi luas ke dalam metode rinci melalui strategi pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data yang bersifat spesifik. Craswell (2018) membagi metode penelitian menjadi tiga yang meliputi kuantitatif, kualitatif dan campuran kuantitatif dan kualitatif⁷².

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia. Dalam pengambilan data metode kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, serta menganalisis data yang ada. Dengan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi secara mendalam, serta memahami bagaimana strategi pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan masyarakat dapat berkolaborasi dalam melakukan Pengembangan UMKM di Kampung Logam Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo khususnya pada masa pandemi Covid-19 melalui Perspektif *Local Economic Development* (LED).

I.7.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan pemaparan singkat permasalahan, tujuan, serta metode penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini berusaha untuk memperoleh gambaran, dan memperoleh pemahaman mengenai suatu fenomena konstruksi

⁷² Creswell, John W. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fifth. United States: SAGE Publications. Hal 43.

sosial yang terjadi. Maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana peneliti berusaha untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara rinci terkait dengan strategi pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan masyarakat dalam melakukan Pengembangan UMKM di Kampung Logam Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo khususnya pada masa pandemi Covid-19 melalui Perspektif *Local Economic Development* (LED).

I.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian dilaksanakan. Menurut Maleong cara terbaik yang dapat dilakukan dalam penentuan lapangan penelitian yaitu dengan mempertimbangkan teori substansif dan menjajaki lapangan guna menemukan kesesuaian dengan kondisi lapangan yang sesungguhnya⁷³. Penentuan lokasi dalam penelitian ini dilakukan secara purposive yang telah ditentukan dengan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan di Sentra Logam yang terletak pada Kampung Logam Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dengan pertimbangan:

1. Kampung Logam memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang, sehingga menjadi salah satu usaha dalam bidang industri manufaktur yang berkembang pesat dengan teknologi baru serta dengan adanya naungan dari Pemerintah Daerah Sidoarjo, maupun dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam Pengembangan UMKM Kampung Logam Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
2. Pada Kampung Logam selain keunggulan dalam industri manufaktur, masih terdapat fenomena yang menarik yang menjadi objek penelitian ini, seperti kurangnya sumber daya dengan *skill* yang dinilai belum cukup dalam bidangnya, tidak meratanya pemberian fasilitas dari Pemerintah Daerah Sidoarjo, serta dalam produksinya masih menggunakan alat yang sederhana karena kurangnya modal untuk membeli mesin dengan teknologi terbaru.

⁷³ *Ibid.*

Penelitian ini juga dilaksanakan di instansi-instansi yang berperan dalam pengembangan UMKM Kampung Logam Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, Koperasi Buana Waru dan Asosiasi yang ada pada Kampung Logam Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

I.7.3 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan menjadi aspek penting dalam penelitian kualitatif dimana informan yang dipilih dianggap terpercaya, memiliki informasi yang dibutuhkan, serta memahami dengan baik mengenai fenomena yang hendak diteliti, sehingga banyak informasi yang harus diperoleh dari pihak-pihak terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan *purposefully select* dimana informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap memahami dengan baik terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini⁷⁴. Informan-informan yang dipilih secara *purposefully* menjadi narasumber yang dianggap paling mengetahui dan memahami terkait permasalahan dalam penelitian yang nantinya dapat memberikan kejelasan jawaban atas permasalahan penelitian dengan menentukan *key informan*. Penggunaan teknik *purposive* dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat memperluas deskripsi informasi dan mencari dan mengetahui secara dalam maupun luas terkait dengan pengembangan UMKM Kampung Logam Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo melalui perspektif *Local Economic Development* (LED).

Berdasarkan uraian diatas, sampel sumber data dalam penelitian ini merupakan instansi-instansi yang berkaitan dengan pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo khususnya pada kawasan setra logam Kampung Logam Desa Ngingas Kecamatan Waru. Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* adalah aktor-aktor yang berperan dalam pengembangan UMKM Kampung Logam Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebagai berikut:

- A. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo

⁷⁴ *Ibid.*

Peneliti memilih informan pada aktor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo (Disperindag) karena Disperindag memiliki peran yang besar dalam menaungi Kampung Logam Desa Ngingas, selain itu Disperindag juga memiliki tanggung jawab yang besar terkait pengembangan UMKM dan merespon isu-isu yang berhubungan dengan Kampung Logam Desa Ngingas. Disperindag sendiri memiliki tugas dengan melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan terhadap UMKM yang ada di Kampung Logam Desa Ngingas. Berikut informan yang dipilih oleh peneliti, yaitu:

1. Agus Darsono, ST, MM, sebagai Kepala Bidang Perindustrian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo)
2. Ir. Moch. Budi Prasetya, sebagai Kepala Seksi Standarisasi Despro dan Promosi (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo)
3. Ibu Ima, sebagai Staf bidang Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo)
4. Ibu Ipung, sebagai Penyuluh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo)

B. Aktor dan pelaku UMKM Kampung Logam Desa Ngingas

Selain memilih informan dari instansi, peneliti juga memilih informan yang memiliki peran maupun terdampak dari pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Disperindag. Peneliti memilih aktor dan pelaku UMKM Kampung Logam Desa Ngingas karena memiliki jabatan pada paguyuban yang ada pada Kampung Logam Desa Ngingas yaitu Asplindo, Pikulan, dan Aspilow, melihat dari UMKM dinaungi oleh Disperindag, UMKM yang terbantu, UMKM home industry. Berikut beberapa informan yang dianggap memahami dan dapat memberikan informasi terkait dengan fokus penelitian ini melalui wawancara mendalam:

1. Pak Ibnu, sebagai Manajer Koperasi Buana Waru Desa Ngingas
2. Pak Haji Agus, sebagai Ketua Kelompok UKM Logam Ngingas Asplindo dan pelaku usaha UD.Trilaksana Mandiri

3. Pak Samsul, sebagai Ketua Kelompok UKM Logam Ngingas Pikulan dan pelaku usaha PT. Aji Batara Perkasa (ABP)
4. Pak Chasinuddin, sebagai pelaku UMKM UD. Karya
5. Pak Yudi, sebagai Staf HRD dan Purchasing PT Elang Jaga
6. Mas Muhammad Abi Dzarrin, sebagai Pelaku UMKM UD. Rose Mekar

I.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, data menjadi sangat diperlukan karena dengan adanya data peneliti dapat mengetahui kondisi riil dan lebih detail melihat fenomena sosial secara langsung yang terjadi di lapangan yang nantinya akan dianalisis menggunakan teori-teori yang digunakan sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian kualitatif memiliki dua jenis data yang dibutuhkan yaitu data primer berupa kata-kata maupun tindakan yang direkam dan ditulis kemudian di dapatkan melalui sumber utama seperti informan yang telah ditentukan, lalu data yang di dapatkan akan di sesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui berbagai literasi seperti jurnal ilmiah dan buku, data publikasi pemerintah, dan media massa elektronik maupun cetak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pengumpulan data menurut Creswell (2018) yang meliputi⁷⁵:

1. Observasi

Observasi merupakan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan terkait perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi pada penelitian melalui turun langsung ke lokasi penelitian yang berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo serta Kampung Logam Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Peneliti melakukan pengamatan seluruh kegiatan yang berlangsung secara teliti yang dilakukan oleh Disperindag maupun pelaku UMKM sendiri, dan peneliti dapat melihat secara nyata terkait objek dan kondisi penunjang yang dapat dicatat dan diamati.

⁷⁵ *Ibid.*

Sehingga peneliti dapat mendapatkan informasi dan data yang relevan dan rill sehingga dapat menguatkan hasil dari wawancara.

2. Wawancara

Dengan menggunakan metode wawancara, peneliti mengumpulkan data maupun informasi dengan cara tanya jawab yang dilakukan melalui tatap muka langsung, melalui telepon, atau terlibat dalam focus group interview. Pendekatan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dengan tujuan peneliti dapat memperoleh informasi melalui dialog secara terbuka guna informan dapat memberikan informasi secara bebas yang sesuai dengan pandangan, pengetahuan, maupun pengalaman terkait fenomena sosial yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam memperoleh informasi terkait pengembangan UMKM Kampung Logam Desa Ngingas peneliti melakukan wawancara yang dilakukan secara sistematis, dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sistematis dan ditanyakan kepada informan. Dengan menggunakan metode wawancara yang terstruktur ini, informan diberi pertanyaan yang sama, dan peneliti mencatatnya. Wawancara ini dilakukan secara bebas dan juga mendalam, tetapi kebebasan tersebut tetap tidak lepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara. Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak-pihak yang terlibat dengan pengembangan UMKM Kampung Logam Desa Ngingas dari segi dinas dan pelaku UMKM.

3. Dokumen-Dokumen

Pada metode ini dapat membantu peneliti mengumpulkan data-data yang relevan dan menunjang dalam menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dokumen yang digunakan berupa dokumen publik yang meliputi surat kabar, laporan resmi, dan makalah. Peneliti mengumpulkan dokumen yang relevan dan

mampu untuk menjelaskan dan mengungkapkan fenomena permasalahan yang ada di penelitian. Tercakupnya dokumen tersebut akan dianalisis oleh peneliti guna mendapatkan kesimpulan yang objektif dengan cara yang sistematis, sehingga dapat menghasilkan data yang relevan dan sesuai dengan fenomena permasalahan pada penelitian ini. Adapun data atau dokumen yang diperoleh peneliti untuk melengkapi data penelitian terkait pengembangan UMKM Kampung Logam Desa Ngingas, meliputi:

- a. Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo
 - b. Rencana Strategis Disperindag Kabupaten Sidoarjo
 - c. Strategi Disperindag Kabupaten Sidoarjo dalam mempertahankan UMKM Kampung Logam Desa Ngingas
 - d. Program-program yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan UMKM Kampung Logam Desa Ngingas di masa pandemi.
 - e. Peran Disperindag dalam proses pengembangan UMKM Kampung Logam Desa Ngingas
 - f. Bantuan yang diberikan oleh Disperindag Kabupaten Sidoarjo dalam mempertahankan UMKM Kampung Logam Desa Ngingas di masa pandemi
 - g. Struktur organisasi serta jumlah anggota pelaku UMKM Kampung Logam Desa Ngingas
 - h. Jumlah peserta pelaku UMKM Kampung Logam Desa Ngingas pada program *link and match*
 - i. Jenis produk dan area pemasaran para pelaku UMKM di Kampung Logam Desa Ngingas
4. Materi Audio Visual dan Digital

Dalam menambah literasi informasi penelitian terhadap permasalahan yang diteliti diperlukan adanya metode berbentuk verbal maupun non-verbal. Metode ini dapat berupa foto, objek seni, *videotape*, maupun segala bentuk gambar atau suara. Dalam penelitian ini, selain melakukan observasi dan wawancara peneliti juga akan melakukan

pengambilan gambar maupun perekaman suara dengan menggunakan etika peneliti yang tidak mengganggu dan sepertujuan oleh pihak informan guna menambahkan kredibilitas penelitian yang akan dilampirkan. Peneliti mengumpulkan yaitu foto atau dokumentasi yang berkaitan dengan pengembangan UMKM Kampung Logam Desa Ngingas.

I.7.5 Teknik Uji Keabsahan Data

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya validitas dan kreabilitas pada data-data yang telah dikumpulkan. Validitas menjadi salah satu kekuatan penelitian kualitatif yang didasarkan pada penentuan yang akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, maupun pembaca penelitian ini. Sehingga dapat dipahami bahwa validitas dalam data penelitian menjadi penting dalam menggambarkan kepercayaan, keaslian, dan kredibilitas. Pada penelitian ini teknik uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi data. Menurut Crewell (2018) triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menguji melalui berbagai sumber informan dan data yang berbeda-beda kemudian digunakan untuk membangun justifikasi yang koheren. Proses triangulasi dalam penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber. Dengan menggunakan teknik ini peneliti akan melakukan pengecekan ulang terhadap temuannya melalui melakukan perbandingan dengan sumber, metode maupun teori, sehingga dapat menghilangkan perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks studi sewaktu mengumpulkan data terkait berbagai fenomena dan hubungan dari berbagai pandangan. Triangulasi sumber dapat digunakan membandingkan data yang sama dari informan yang berbeda satu dengan yang lain, dengan cara⁷⁶:

1. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan data dari dokumen tertulis dengan wawancara
3. Membandingkan data hasil wawancara mendalam dari berbagai informan yang berbeda

⁷⁶ *Ibid.*

I.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui teknik wawancara secara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan juga adanya data berbentuk audio maupun visual yang disusun secara sistematis. Menurut Bogdan dan Biklen analisis data merupakan suatu upaya dalam mereduksi data menjadi satuan yang dapat dikendalikan, mensintesis, sehingga dapat menemukan sebuah pola, data yang penting, serta memberikan kesimpulan bagi orang lain. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan bertujuan untuk dapat menjelaskan secara ringkas dan detail terkait dengan data secara mendalam. Menurut Creswell (2018) analisis data memiliki lima langkah dalam penelitian kualitatif, yang meliputi⁷⁷:

1. Langkah 1: Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan disiapkan dan dikelola untuk dianalisis dengan melibatkan transkrip wawancara, pengumpulan materi, mengetik data lapangan, menyortir dan mengatur data tersebut kedalam beberapa jenis yang berbeda sesuai sumber informasi.

2. Langkah 2: Membaca data secara keseluruhan

Peneliti membaca kembali keseluruhan data yang ada guna dapat memberikan pengertian umum (*general sense*) terkait dengan informasi yang didapatkan, serta dapat merefleksikan makna secara keseluruhan. Peneliti menulis catatan-catatan khusus yang berkaitan dengan gagasan umum yang didapatkan.

3. Langkah 3: Memulai *coding* semua data

Coding adalah proses mengorganisasian data dengan mengelola materi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Pelaksanaan *coding* dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti pengambilan data selama proses pengumpulan data, mensegmentasikan kalimat maupun gambar dalam beberapa kategori dan memberikan label kategori dalam istilah khusus.

4. Langkah 4: Menunjukkan keterkaitan deskripsi dan tema dalam laporan kualitatif

⁷⁷ *Ibid.*

Deskripsi merupakan suatu usaha yang melibatkan penyampaian informasi secara detail tentang orang, lokasi, atau peristiwa dalam lapangan, lalu menerapkan proses *coding* guna menciptakan kategori atau tema. Tema adalah temuan yang besar dalam penelitian kualitatif karena menjelaskan beragam perspektif dari individu, didukung oleh berbagai kutipan, dan data-data yang spesifik. Selain melakukan identifikasi terhadap tema selama proses *coding*, peneliti juga membangun lapisan tambahan sehingga menghasilkan analisis yang kompleks.

5. Langkah 5: Menginterpretasi deskripsi dan tema

Dalam menyampaikan hasil analisis dapat dilakukan melalui pendekatan naratif dengan pembahasan terkait kronologi peristiwa, tema maupun hubungan antar tema. Hal ini dapat digunakan peneliti kualitatif dalam menyajikan pembahasan melalui visual, gambar, atau tabel. Sehingga dapat menginterpretasikan proses dan memajukan sebuah gambar dengan penelitian yang spesifik dalam penyampaian informasi deskriptif.